



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar Unand.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin Unand.

ANALISIS PENGARUH PDRB PERKAPITA DAN ANGKA HARAPAN HIDUP TERHADAP TINGKAT KEMISKINAN DI SUMATERA BARAT

SKRIPSI



**OKIRISWANDI
07151038**

**JURUSAN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS ANDALAS
PADANG 2011**

LEMBARAN PERSEMBAHAN DAN MOTTO

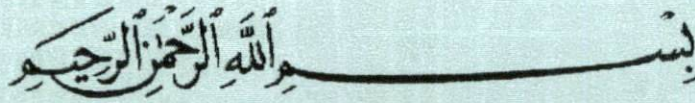
Alhamdulillah Robbil `Alamin. Segala Puji & Syukurku
Bagi Allah SWT Atas Rahmat & Petunjuk-Nya
Sehingga Karya Sederhana Ini Dapat Terselamatkan.

Rupersembahkan karya kecilku ini
untuk keluarga terutama untuk kedua orang tua,
kakak dan adikku
serta orang-orang terdekatku
yang selalu memberikan harapan, semangat
dan cinta dengan sepenuh hati

Motto :

- ✦ *Allah SWT tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kemampuannya. (QS. Al Mu'minun:62)*
- ✦ *Sungguh, Allah SWT tidak akan mengubah nasib suatu kaum sampai mereka sendiri yang mengubah dirinya. (QS. Ar Ra'du:11)*
- ✦ *Sesungguhnya sesudah kesulitan itu pasti ada Kemudahan. (QS. Asy Syarh:5&6)*
- ✦ *Kemalasan tidak lebih dari kebiasaan beristirahat saat belum letih. (Jules Renard)*
- ✦ *Mendapat kepercayaan itu mudah, yang lebih mudah lagi menghancurkan, tapi yang sulit adl membina dan menjaga kepercayaan itu.*
- ✦ *Berbuat kesalahan adalah hal yang biasa. Tetapi memperbaiki semua kesalahan adalah hal yang sangat luar biasa.*
- ✦ *Hidup ini akan menjadi penuh arti, apabila mempunyai arti / manfaat untuk orang lain.*
- ✦ *Usaha tanpa do'a itu "SOMBONG", do'a tanpa usaha itu "SIJA-SIJA"*

KATA PENGANTAR



Syukur alhamdulillah, penulis ucapkan puji syukur ke hadirat Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, semoga penulis selalu dalam lindungan-Nya. Amin ya robbalalamin. Dan sholawat beriring salam penulis haturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Pengaruh PDRB Perkapita Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat”**.

Penulisan ini bertujuan untuk memenuhi sebagian syarat yang harus dipenuhi oleh setiap mahasiswa untuk menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas

Dalam penulisan skripsi ini banyak sekali pihak-pihak yang telah membantu penulis, memberi dukungan dan masukan-masukan, dalam menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis ingin sekali mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Andalas beserta jajarannya;
2. Bapak Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec, DEA. Ing selaku Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
3. Bapak Drs. Wirzon, MS selaku dosen pembimbing skripsi, yang telah bersedia meluangkan waktu dan memberi petunjuk, saran dan pengarahan dalam penulisan skripsi ini;

4. Ibu Dra. Erniati Husni, ME dan Ibu Dra. Hj. Syukriati Sy, Msi selaku tim pembahas yang telah memberikan saran dan kritik yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini;
5. Bapak Drs. M. Nazer, MA sebagai pembimbing akademik yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan kepada penulis selama kuliah;
6. Bapak Febriandi Prima Putra, SE, MSi selaku Kepala Program Studi Ekonomi Pembangunan Jurusan Ilmu Ekonomi pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas;
7. Seluruh dosen yang mengabdikan pada Fakultas Ekonomi Universitas Andalas yang telah memberikan ilmu pengetahuan, bimbingan dan pengarahan kepada penulis;
8. Bapak dan Ibu karyawan biro dan pustaka Jurusan Ilmu Ekonomi serta pegawai dekanat Fakultas Ekonomi yang telah membantu proses kelancaran administrasi selama penulis kuliah;
9. Kedua orang tuaku tercinta yang telah mendidik dan membesarkan dengan penuh kasih sayang serta memberikan semangat dan doa kepada penulis, kepada saudaraku Uda Deri Haryadi, ST, Pebri Wardianda dan Hartiwi Ramanisa yang telah memberikan masukan, semangat dan dorongan dalam menjalani hari demi hari dalam penyelesaian skripsi ini hingga menjadi sarjana yang selalu berada dalam kecintaan dan kasih sayang. Semoga kita selalu berada di bawah naungan ridho ilahi, Amin;
10. Seluruh sahabat dan teman-temanku di Jurusan Ilmu Ekonomi Angkatan 2007 (Andi, Tessa, Jefri, Amir, Hajal, Mahlil, Yuda, Eno, Anggi, firman, merisa darman, aau, eka, mira, redha febi, kiki, wiwit, nia, yelma, vivi

rizka, inel, melfa, Eci, ami , Icha, mayang, dona..."SE" ,ee lesuik, aya, adi, rio, ijul, rezi, rizki, ferdi, rizki ganteng, anes, aan, farid, teja, Mario, mirfan, meri, rivo, andri, nera, ayu, mike, wedi, imeng, k'maya, mita, jessi puipui..."Calon SE" dll yang tidak disebutkan satu persatu)

11. Warga azizi dan kadai lontong 07 (Rahmat Boys Pikangshua, Gerry My Hobby, Loro Si Poro, Ilham Rain BB, Dani Alai , Isra Uncu, Wahyu Mando sang DJ Alligator, Indra CS Pak Boy, Pangeran Si Bro, Angga Disini, Ade Bucek, Ayat Papi, Werri We, Ijal Parlente, Ian Dronk, BS Iwanz Cakay A.Md "**Terima Kasih Atas Prosesnya ,SEmangat kuliah teman dan cepat jadi Sarjana**"). Serta Wanita yang sering ditemui Chelsy dan Qeqe teman seperjuangan yang sudah menjadi SE;
12. Da Fajar, Da Eko, Da Yudi, Da Pendi, Da Faisal, Da Komeng, Da Koko Da Pis, Da Jalu, dan Uda-Uda Toserba , Terima Kasih atas Bimbingan dan waktunya da;
13. Boy Azef dkk (makasih banyak boy) atas bantuan olah datanya serta masukan yang sangat bermanfaat;
14. Uda-Uda, Uni2, Kawan2 dan Adiak2 di JIE dan FEUA terima kasih atas kebersamaan yang member arti dan warna dalam kehidupan kita masing-masing;
15. Terima Kasih yang sebesar- besarnya buat EKONOMI UNAND;
16. Seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah membantu penulis didalam penyelesaian skripsi ini.

Tanpa mengurangi arti dengan tidak menyebutkan satu persatu seluruh pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini, semoga bantuan, bimbingan dan arahan yang telah diberikan mendapat balasan yang setimpal dari Allah SWT.

Meskipun demikian, penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini dikarenakan keterbatasan pengetahuan penulis. Oleh karena itu penulis mengharapkan kritik dan saran dari pembaca sehingga skripsi ini dapat menjadi lebih baik.

Wassalam

Padang, September 2011

Okiriswandi

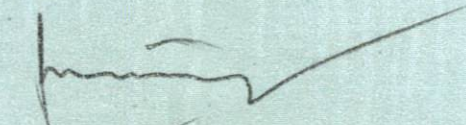
LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Dengan ini dinyatakan bahwa :

Nama : **Okiriswandi**
No. BP : 07 151 038
Jenjang Pendidikan : S-1 (Strata Satu)
Jurusan : Ilmu Ekonomi
Judul Skripsi : **Analisis Pengaruh PDRB Perkapita Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat**

Telah diuji dan disetujui skripsinya melalui Ujian Seminar Hasil yang diadakan pada tanggal 27 Juli 2011 sesuai dengan prosedur, ketentuan, dan kelaziman yang berlaku.

Menyetujui,
Pembimbing Skripsi

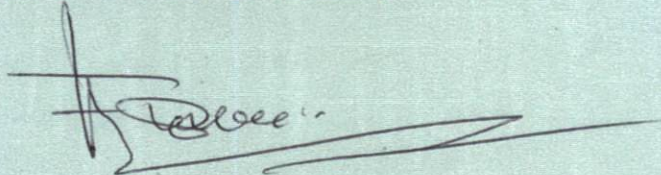


Drs. Wirzon, MS
NIP. 195804241987071002

Mengetahui,

Dekan Fakultas Ekonomi

Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi



Prof. Dr. H. Syafruddin Karimi, SE, MA
NIP. 19541009198021001

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M.Ec. DEA. Ing
NIP. 130812952



No. Alumni Universitas

OKIRISWANDI

No. Alumni Fakultas

BIODATA

a) Tempat/tanggal lahir : Padang, 19 Oktober 1989 b) Nama Orang Tua : Azwar, ST dan Nurdani c) Fakultas : Ekonomi d) Jurusan : Ilmu Ekonomi e) No BP : 07151038 f) Tanggal Lulus : 27 Juli 2011 g) Predikat Lulus : Sangat Memuaskan h) IPK : 3,38 i) Lama Studi : 3 tahun 10 bulan h) Alamat Orang Tua : Komp. Taruko 1 Blok N.9 Kel. Korong Gadang Kec. Kuranji Padang

Analisis Pengaruh PDRB Perkapita Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat
Skripsi S1 Oleh : Okiriswandi
Pembimbing : Drs. Wirzon, MS

ABSTRAK

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia, ditandai oleh ketidakmampuan dalam memenuhi standar hidup minimum yang menyangkut tentang kesejahteraan manusia yang diukur melalui pendapatan, kesehatan dan keamanan. (Kuncoro, 1997). Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel PDRB perkapita dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan data sekunder yang merupakan panel data yaitu (time series) tahun 2005-2009 dan (cross section) 19 Kabupaten/kota, yang diperoleh dari BPS Sumatera Barat. Pengolahan data dilakukan secara regresi dengan menggunakan metode Ordinary Least Square (OLS). Berdasarkan penelitian yang dilakukan, diperoleh hasil bahwa PDRB perkapita dan angka harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat. Hal ini menunjukkan bahwa kedua variabel ini memiliki hubungan terbalik terhadap tingkat kemiskinan.

Skripsi telah dipertahankan di depan sidang penguji dan dinyatakan lulus pada tanggal : 27 Juli 2011
Abstrak telah disetujui oleh pembimbing dan pembahas

Tanda Tangan			
Nama Terang	Drs. Wirzon, MS	Dra. Erniati Husni, ME	Dra. Hj. Syukriati Sy, MSi

Mengetahui,
Ketua Jurusan

Prof. Dr. H. Firwan Tan, SE, M. Ec, DEA. Ing
NIP : 130812952

Tanda Tangan

Alumnus telah mendaftar ke fakultas/universitas dan mendapat nomor alumni :

	Petugas Fakultas/Universitas	
No. Alumni Fakultas :	Nama :	Tanda Tangan
No. Alumni Universitas :	Nama :	Tanda Tangan

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR

LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

ABSTRAK

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR LAMPIRAN	v

BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	3
1.3 Tujuan Penelitian	3
1.4 Kegunaan Penelitian	3
1.5 Sistematika Penulisan	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1. Landasan Teori	7
2.1.1 Kemiskinan	7
2.1.2 Indikator dan Ukuran Kemiskinan	14
2.1.3 Teori Kemiskinan	16
2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	17
2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi	17
2.1.6 Kesehatan dalam Pembangunan	21
2.1.7 Pengaruh PDRB perkapita terhadap Kemiskinan	23
2.1.8 Pengaruh Kesehatan terhadap Kemiskinan	25
2.2. Penelitian Terdahulu	26
2.3. Kerangka Pemikiran Teoritis	28
2.4. Hipotesis	29

BAB III METODE PENELITIAN	30
3.1 Data dan Sumber Data	30
3.2 Pembentukan Model	31
3.3 Definisi Operasional Variabel dan Pengukurannya.....	33
3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data.....	34
3.5 Uji Statistik.....	34
3.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Individual (Uji t).....	35
3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi Secara Serentak (Uji F)....	36
3.5.3 Koefisien Determinasi R^2	37
3.6 Uji Asumsi Klasik	37
 BAB IV GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN	 42
4.1 Gambaran Umum Propinsi di Sumatera Barat	42
4.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat	42
4.3 Perkembangan PDRB Perkapita di Sumatera Barat	47
4.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup di Sumatera Barat	50
 BAB V HASIL EMPIRIS	 54
5.1 Hasil Regresi.....	54
5.2 Uji Asumsi Klasik	56
5.2.1 Uji Normalitas	56
5.2.2 Uji Autokorelasi.....	57
5.2.3 Uji Multikolinearitas.....	57
5.2.4 Uji Heteroskedastisitas	58
 BAB VI KESIMPULAN DAN SARAN	 59
6.1 Kesimpulan	59
6.2 Saran.....	59
 DAFTAR PUSTAKA	 61
LAMPIRAN	65

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan	
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	
Tahun 2005-2009	43
Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%)	
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	
Tahun 2006-2009	45
Tabel 4.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000	
Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Juta Rupiah)	
Tahun 2005 – 2009	48
Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan (%) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga	
Konstan Tahun 2000 Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat	
Tahun 2006 – 2009	49
Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup (Tahun)	
Kabupaten/kota di Sumatera Barat	
Tahun 2005-2009	51
Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (Persen)	
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat	
Tahun 2006-2009	52
Tabel 5.1 Uji Multikolinearitas	57
Tabel 5.2 Uji Heteroskedastisitas	58

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Lingkaran Setan Kemiskinan (<i>vicious circle poverty</i>).....	16
Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teori	28
Gambar 3.1 Aturan membandingkan Uji Durbin-Watson Dengan Tabel Durbin Watson	39

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Hasil Regresi	65
Lampiran 2. Uji Asumsi Klasik.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemiskinan merupakan masalah multidimensi yang dihadapi hampir semua negara di dunia. Kemiskinan adalah ketidakmampuan untuk memenuhi standar hidup minimum yang menyangkut tentang kesejahteraan manusia yang meliputi berbagai ukuran tradisional tentang kemakmuran, misalnya pendapatan, kesehatan dan keamanan. Konsumsi rumah tangga dipandang oleh para ahli ekonomi sebagai sebuah rangkuman ukuran umum tentang sumber daya rumah tangga yang tersedia dan karenanya menjadi dimensi yang lebih disukai untuk memulai kajian tentang kemiskinan (Kuncoro, 1997).

Bank Dunia mengukur kemiskinan dengan penghasilan US \$ 1 per hari per kapita. BPS mengukur dengan kebutuhan minimum makanan dengan patokan 2100 kalori/hari dan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa. UNDP (1997) mengukur dengan indikator *Human Development Indeks* (HDI) meliputi kehidupan, pendidikan dasar, dan ketetapan ekonomi.

Permasalahan strategis di pemerintahan Provinsi Sumatera Barat tidak jauh berbeda dengan di pemerintahan pusat (problem nasional), yakni cukup tingginya angka kemiskinan. Berdasarkan Data dan Informasi Kemiskinan tahun 2009, tingkat kemiskinan Sumatera Barat masih menduduki peringkat ke 12 dari 33 Provinsi di Indonesia dengan persentase 9,54 %, angka ini merupakan tingkat kemiskinan dibawah rata-rata nasional. Oleh karena itu, kemiskinan menjadi tanggung jawab bersama, terutama pemerintah sebagai penyangga proses perbaikan kehidupan masyarakat dalam sebuah pemerintahan, untuk segera

mencari jalan keluar dengan merumuskan langkah-langkah yang sistematis dan strategis sebagai upaya pengentasan kemiskinan.

Pada periode 2005 – 2006 jumlah penduduk miskin di Sumatera Barat mengalami peningkatan dari 482.800 jiwa (10,89 %) menjadi 578.726 jiwa (12,51 %). Namun pada periode 2006-2009 jumlah penduduk miskin mengalami penurunan menjadi 9,45 % pada tahun 2009.

Pertumbuhan ekonomi merupakan kunci dari penurunan kemiskinan di suatu wilayah. Peningkatan pertumbuhan ekonomi mengindikasikan pemerintah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya, sehingga dapat mengurangi tingkat kemiskinan.

PDRB perkapita adalah PDRB dibagi dengan jumlah penduduk yang digunakan sebagai indikator pembangunan. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar potensi sumber penerimaan daerah tersebut.

PDRB perkapita Sumatera Barat mengalami peningkatan pada periode 2005-2009 dari 6,49 juta rupiah menjadi 7,75 juta rupiah. Tertinggi pada tahun 2009 adalah Kota Padang dengan 12,96 juta rupiah dan terendah Kabupaten Pesisir Selatan dengan 4,46 Juta Rupiah.

Kemiskinan suatu daerah dipengaruhi oleh kesehatan masyarakatnya. Semakin tinggi angka harapan hidup, maka semakin panjang usia harapan hidup bayi-bayi yang dilahirkan pada tahun tersebut (BPS,2007). Angka harapan hidup merupakan alat mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Menganalisis pengaruh PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.
2. Menganalisis pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang dapat diperoleh dari hasil penelitian ini adalah:

1. Kegunaan praktis, yaitu diharapkan penelitian ini bagi Provinsi Sumatera Barat dapat sebagai gambaran atau informasi tentang Pengaruh PDRB perkapita dan angka harapan hidup di Sumatera Barat.
2. Kegunaan teoritis, yaitu diharapkan penelitian dapat menambah khasanah ilmu ekonomi khususnya ekonomi pembangunan. Manfaat khusus bagi ilmu pengetahuan yakni dapat melengkapi kajian mengenai kemiskinan dengan mengungkap secara empiris faktor-faktor yang mempengaruhinya
3. Bagi penulis adalah untuk melengkapi salah satu syarat dalam mencapai gelar sarjana.

kesehatan, dan program sosial seperti kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori yang termasuk program pemberantasan kemiskinan (BPS 2007).

Di Sumatera Barat angka harapan hidup periode 2005-2009 mengalami peningkatan dari 68,20 tahun menjadi 69,25 tahun. Naiknya angka harapan hidup menurut Gubernur Sumatera Barat dalam Koran Jakarta (2008) menunjukkan kegiatan pembangunan bidang kesehatan secara umum telah terwujud dan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, maka penulis tertarik untuk membahas pengaruh PDRB perkapita dan angka harapan hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan di Sumatera Barat, khususnya pada periode 2005-2009. Pembahasan ini akan dituangkan ke dalam sebuah skripsi yang berjudul : **“Analisis Pengaruh PDRB Perkapita Dan Angka Harapan Hidup Terhadap Tingkat Kemiskinan Di Sumatera Barat Studi Kasus (Kabupaten/Kota) ”**.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut diatas , rumusan masalah dalam penelitian ini antara lain :

1. Bagaimana pengaruh PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?
2. Bagaimana pengaruh angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat?

1.5 Sistematika Penulisan

Agar pembahasan skripsi ini dapat dipahami secara jelas, maka penulis membagi skripsi ini dalam 6 (enam) bab sebagai berikut :

1. Bab I Pendahuluan

Dalam bab ini akan dijelaskan mengenai latar belakang dari studi ini yang selanjutnya dirumuskan permasalahan penelitian yang berupa pertanyaan kajian. Berdasarkan perumusan masalah tersebut maka dikemukakan tujuan dan kegunaan penelitian. Pada bagian terakhir dalam bab ini akan dijabarkan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Bab ini berisi tentang teori-teori dan penelitian terdahulu yang melandasi penelitian ini. Berdasarkan teori dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka akan terbentuk suatu kerangka pemikiran dan penentuan hipotesis awal yang akan diuji.

3. Bab III Metode Penelitian

Bab ini menjelaskan mengenai data dan sumber data, pembentukan model, definisi operasional variabel dan pengukurannya, Metode pengolahan dan analisis data dan uji statistik.

4. Bab IV Gambaran Umum Daerah Penelitian

Bab ini berisi mengenai gambaran umum objek penelitian dan analisis deskriptif terhadap tingkat kemiskinan, PDRB perkapita, angka harapan hidup tahun 2005-2009.

5. Bab V Hasil Empiris

Dalam bab ini akan menjawab pertanyaan bagaimana pengaruh dari PDRB perkapita, dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat.

6. Bab VI Kesimpulan Dan Saran

Bab ini adalah bab terakhir, dalam bab ini menyajikan secara singkat kesimpulan yang diperoleh dalam pembahasan serta saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

Dalam bab ini penulis akan menyajikan definisi dan teori-teori yang terkait antara lain, teori kemiskinan dan teori pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan kajian teori dan kajian empiris maka dibuat kerangka penelitian dan selanjutnya hipotesis penelitian yang merupakan dugaan sementara dalam penelitian.

2.1.1 Kemiskinan

Menko Kesra (2000), mendefinisikan kemiskinan sebagai keadaan kekurangan yang dialami oleh seseorang atau sekelompok orang di luar keinginan yang bersangkutan sebagai kejadian yang tidak dapat dihindari dengan kekuatan dan kemampuan yang dimilikinya yang disebabkan oleh berbagai faktor yang sangat kompleks yang berinteraksi satu sama lain. Menurut BAPPENAS (2002), kemiskinan mencakup unsur-unsur ketidakmampuan memenuhi kebutuhan dasar (pangan, pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, transportasi dan sanitasi); kerentanan; ketidakberdayaan; ketidakmampuan menyalurkan aspirasinya.

Menurut BPS (2002), kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum makanan dan non makanan (Kebutuhan minimum makanan menggunakan patokan 2.100 kalori/hari, kebutuhan non makanan meliputi perumahan, sandang, aneka barang dan jasa). Kemiskinan menurut Bank Dunia (2007) adalah kondisi tidak dapat menikmati segala macam pilihan dan kesempatan dalam pemenuhan kebutuhan dasar (kesehatan, standar hidup layak, kebebasan, harga diri, dan rasa dihormati seperti orang lain).

Ukuran kemiskinan menurut Nurkse 1953 dalam (Kuncoro, 1997) secara sederhana dan yang umum digunakan dapat dibedakan menjadi tiga :

(1) Kemiskinan Absolut

Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup.

Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

(2) Kemiskinan Relatif

Seseorang termasuk golongan miskin relatif apabila telah dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya, tetapi masih jauh lebih rendah dibandingkan dengan keadaan masyarakat sekitarnya. Berdasarkan konsep ini, garis kemiskinan akan mengalami perubahan bila tingkat hidup masyarakat berubah sehingga konsep kemiskinan ini bersifat dinamis atau akan selalu ada. Oleh karena itu, kemiskinan dapat dari aspek ketimpangan sosial yang berarti semakin besar ketimpangan antara

tingkat penghidupan golongan atas dan golongan bawah, maka akan semakin besar pula jumlah penduduk yang dapat dikategorikan selalu miskin.

(3) Kemiskinan Kultural

Seseorang termasuk golongan miskin kultural apabila sikap orang atau sekelompok masyarakat tersebut tidak mau berusaha memperbaiki tingkat kehidupannya sekalipun ada usaha dari pihak lain yang membantunya atau dengan kata lain seseorang tersebut miskin karena sikapnya sendiri yaitu pemalas dan tidak mau memperbaiki kondisinya.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan definisi kemiskinan absolut yang biasa digunakan BPS. Seseorang termasuk golongan miskin absolut apabila hasil pendapatannya berada di bawah garis kemiskinan dan tidak cukup untuk menentukan kebutuhan dasar hidupnya. Konsep ini dimaksudkan untuk menentukan tingkat pendapatan minimum yang cukup untuk memenuhi kebutuhan fisik terhadap makanan, pakaian, dan perumahan untuk menjamin kelangsungan hidup. Kesulitan utama dalam konsep kemiskinan absolut adalah menentukan komposisi dan tingkat kebutuhan minimum karena kedua hal tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh adat kebiasaan saja, tetapi juga iklim, tingkat kemajuan suatu negara, dan faktor-faktor ekonomi lainnya. Walaupun demikian, untuk dapat hidup layak, seseorang membutuhkan barang-barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan fisik dan sosialnya.

Menurut Sharp, et al 1996 dalam (Kuncoro, 1997) kemiskinan bersumber dari beberapa hal, yaitu:

(1) Rendahnya kualitas angkatan kerja.

Salah satu penyebab terjadinya kemiskinan adalah karena rendahnya kualitas angkatan kerja. Kualitas angkatan kerja ini bisa dilihat dari angka buta huruf. Sebagai contoh Amerika Serikat hanya mempunyai angka buta huruf sebesar 1%, dibandingkan dengan Ethiopia yang mempunyai angka di atas 50%.

(2) Akses yang sulit terhadap kepemilikan modal.

Kepemilikan modal yang sedikit serta rasio antara modal dan tenaga kerja (*capital-to-labor ratios*) menghasilkan produktivitas yang rendah yang pada akhirnya menjadi faktor penyebab kemiskinan.

(3) Rendahnya tingkat penguasaan teknologi.

Negara-negara dengan penguasaan teknologi yang rendah mempunyai tingkat produktivitas yang rendah pula. Tingkat produktivitas yang rendah menyebabkan terjadinya pengangguran. Hal ini disebabkan oleh kegagalan dalam mengadaptasi teknik produksi yang lebih modern. Ukuran tingkat penguasaan teknologi yang rendah salah satunya bisa dilihat dari penggunaan alat-alat produksi yang masih bersifat tradisional.

(4) Penggunaan sumber daya yang tidak efisien.

Negara miskin sumber daya yang tersedia tidak dipergunakan secara penuh dan efisien. Pada tingkat rumah tangga penggunaan sumber daya biasanya masih bersifat tradisional yang menyebabkan terjadinya inefisiensi.

(5) Pertumbuhan penduduk yang tinggi.

Menurut teori Malthus jumlah penduduk berkembang sesuai deret ukur sedangkan produksi bahan pangan berkembang sesuai deret hitung. Hal ini mengakibatkan kelebihan penduduk dan kekurangan bahan pangan. Kekurangan bahan pangan merupakan salah satu indikasi terjadinya Kemiskinan.

Program-program pemerintah dalam pengentasan Kemiskinan:

(1) Bantuan Langsung Tunai (BLT)

Bantuan langsung tunai adalah bantuan berupa uang tunai yang diberikan pemerintah kepada masyarakat sebagai akibat naiknya harga bahan bakar minyak. Bentuk uang tunai diberikan untuk mencegah turunnya daya beli masyarakat miskin yang disebabkan oleh naiknya harga BBM. Program jangka pendek ini bersifat sementara, diarahkan sedemikian rupa sehingga tidak menimbulkan ketergantungan serta tidak mendorong menguatnya *culture of poverty*. Besarnya BLT adalah Rp 100.000 per bulan per rumah tangga sasaran (BAPPENAS, 2005).

(2) Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM)

PNPM Mandiri dirumuskan kembali mekanisme upaya penanggulangan kemiskinan yang melibatkan unsur masyarakat, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, hingga pemantauan dan evaluasi. Melalui proses pembangunan partisipatif, kesadaran kritis dan kemandirian masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (www.pnpm-mandiri.org).

(3) Kredit Usaha Rakyat (KUR)

Kredit Usaha Rakyat, yang selanjutnya disingkat KUR, adalah kredit/ pembiayaan kepada Usaha Mikro Kecil Menengah Koperasi (UMKM-K) dalam bentuk pemberian modal kerja dan investasi yang didukung fasilitas penjaminan untuk usaha produktif. KUR adalah program yang dicanangkan oleh pemerintah namun sumber dananya berasal sepenuhnya dari dana bank (Retnadi, 2008).

(4) Program Raskin

Program Raskin (Program Penyaluran Beras untuk Keluarga Miskin) adalah sebuah program dari pemerintah. Program tersebut adalah sebuah upaya untuk mengurangi beban pengeluaran dari rumah tangga-rumah tangga miskin sebagai sebuah bentuk dukungan dalam meningkatkan ketahanan pangan dengan memberikan perlindungan sosial kepada rumah tangga-rumah tangga miskin melalui distribusi beras murah dengan jumlah maksimal 15 kg/ rumah tangga miskin/ bulan dengan

masing-masing seharga Rp 1.600,00 per kg (netto) di titik distribusi. Program ini mencakup seluruh provinsi, sementara tanggung jawab dari distribusi beras dari gudang sampai ke titik distribusi di Kelurahan dipegang oleh Perum BULOG. Pelaksanaan program Raskin Program Kompensasi Pengurangan Subsidi Bahan Bakar Minyak di beberapa daerah selama ini masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan (Wahyuni, 2010).

(5) Inpres Desa tertinggal (IDT)

Program Inpres Desa Tertinggal (IDT) yang dilandasi oleh Kebijakan Keputusan Presiden (Kepres) No. 3 tahun 1993 tentang peningkatan penanggulangan kemiskinan telah berjalan sejak 1 April 1994. Program ini secara ideal adalah untuk memberdayakan kaum miskin dan desa tertinggal baik di pedesaan maupun perkotaan. Dari dimensi politis program ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembangunan adalah untuk rakyat, artinya kepedulian pemerintah terhadap kaum tertinggal (penduduk dan desa miskin) bukan sekedar slogan pembangunan (Laporan penelitian Perpustakaan UI, Liswanti Hatta masyarakat, terutama masyarakat miskin, dapat dapat ditumbuhkembangkan sehingga mereka bukan sebagai obyek melainkan sebagai subyek upaya penanggulangan kemiskinan (www.pnpm-mandiri.org) beberapa daerah selama ini masih banyak ditemukan berbagai penyimpangan (wahyuni, 2010)

2.1.2 Indikator Dan Ukuran Kemiskinan

Adapun kriteria rumah tangga miskin menurut versi BPS (2005-2006) adalah :

1. Luas Lantai bangunan tempat tinggal kurang dari 8 m² per orang.
2. Jenis lantai bangunan tempat tinggal terbuat dari tanah/bambu/kayu murahan.
3. Jenis dinding tempat tinggal terbuat dari bambu/rumbia/kayu berkualitas rendah/tembok tanpa di plester.
4. Tidak memiliki fasilitas buang air besar/bersama-sama rumah tangga lain.
5. Sumber penerangan rumah tangga tidak menggunakan listrik.
6. Sumber air minum berasal dari sumur/mata air tidak terlindung/sungai/air hujan.
7. Bahan bakar untuk memasak sehari-hari adalah kayu bakar/arang/minyak tanah.
8. Hanya mengkonsumsi daging/susu/ayam satu kali dalam seminggu.
9. Hanya membeli satu stel pakaian dalam setahun.
10. Hanya sanggup makan sebanyak satu/dua kali sehari.
11. Tidak sanggup membayar biaya pengobatan di Puskesmas/poliklinik.
12. Sumber penghasilan Kepala Keluarga Rumah Tangga: petani dengan luas lahan 0,5 ha, buruh tani, nelayan, buruh bangunan, dll dengan pendapatan < Rp. 600 ribu perbulan.
13. Pendidikan tertinggi Kepala Keluarga rumah tangga : tidak bersekolah/tidak tamat SD/hanya SD.
14. Tidak memiliki tabungan/barang yang mudah dijual dengan Rp 500 ribu seperti : sepeda motor (kredit/non kredit), emas, ternak, kapal motor atau barang modal lainnya.

Untuk membedakan penduduk miskin dengan penduduk tidak miskin biasanya digunakan sebuah ukuran yaitu garis pembatas yang disebut garis kemiskinan (*poverty line*). Penduduk yang hidup dibawah garis kemiskinan inilah yang disebut dengan penduduk miskin (Esmara 1992 dalam Yakub 2004). Didalam berbagai literatur ekonomi, penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan disebut juga dengan kemiskinan absolut.

Di Indonesia garis kemiskinan yang dipakai adalah garis kemiskinan yang dikeluarkan BPS. Menurut BPS garis kemiskinan dinyatakan sebagai besarnya rupiah yang dikeluarkan atau dibelanjakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi yang disetarakan dengan 2100 kalori per kapita per hari ditambah dengan pemenuhan kebutuhan pokok minimum lain seperti sandang, perumahan, kesehatan, pendidikan, angkutan dan bahan bakar. Dengan demikian apabila seseorang atau keluarga berada di bawah garis kemiskinan, sehingga jumlahnya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup minimumnya, maka orang atau keluarga tersebut disebut miskin absolut. Besarnya pengeluaran per kapita perhitungan garis kemiskinan secara terpisah untuk daerah perkotaan dan pedesaan.

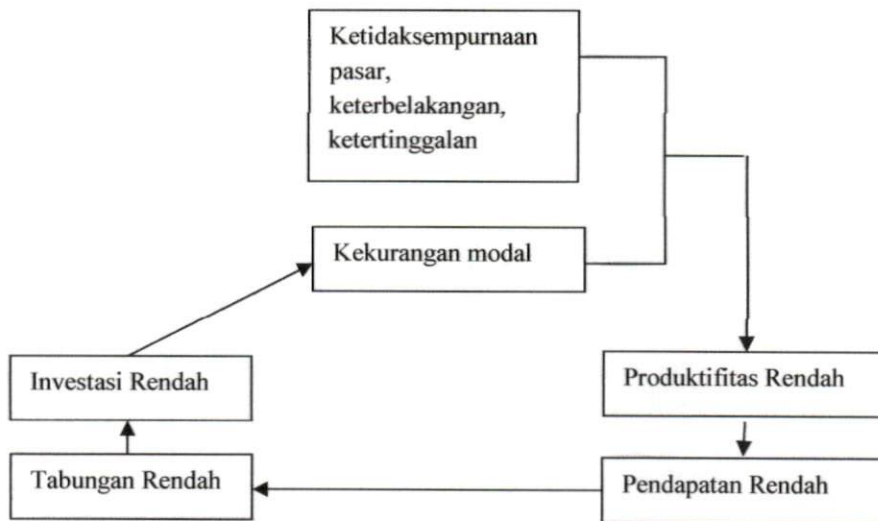
Kebutuhan lainnya selain makanan meliputi perumahan (penerangan, bahan bakar, dan air bersih), pakaian, barang tahan lama, dan jasa. Untuk pengeluaran jenis makanan, BPS tidak terpaku pada salah satu jenis makanan seperti beras sebagai patokan. Dengan demikian nilai uang dari jumlah kalori dihitung berdasarkan rasio konsumsi rumah tangga total sehingga diperoleh konsumsi total minimum yang dianggap sebagai garis batas kemiskinan. Kriteria ini ditetapkan sejak tahun 1976 sampai sekarang dan terus mengalami peningkatan seiring dengan kenaikan harga barang.

2.1.3 Teori kemiskinan

Penyebab kemiskinan suatu wilayah ini berkonsep pada Teori lingkaran setan kemiskinan (*vicious circle poverty*). Adanya keterbelakangan, ketidaksempurnaan pasar, dan kurangnya modal menyebabkan rendahnya produktivitas sehingga menyebabkan rendahnya pendapatan yang mereka terima. Rendahnya pendapatan akan berimplikasi pada rendahnya tabungan dan investasi, rendahnya investasi akan berakibat kekurangan modal, kurangnya modal akan menyebabkan pada keterbelakangan dan seterusnya (Gambar 2.1). Logika berpikir ini dikemukakan oleh Nurkse (1943) yang mengatakan bahwa : " *a poor country is poor because its poor* " (negara miskin itu miskin karena dia miskin).

Gambar 2.1

Lingkaran Setan Kemiskinan (*vicious circle poverty*)



Sumber : Todaro, 2000

2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan

Pertumbuhan ekonomi merupakan perubahan tingkat kegiatan dari tahun ke tahun (Sukirno, 2000). Untuk mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, harus diperbandingkan pendapatan nasional berbagai tahun yang dihitung berdasarkan harga konstan.

Kemiskinan adalah suatu situasi dimana pendapatan tahunan individu di suatu daerah tidak dapat memenuhi standar pengeluaran minimum yang dibutuhkan individu untuk dapat hidup layak di wilayah tersebut. Individu yang hidup dibawah standar pengeluaran minimum tersebut tergolong miskin. Ketika perekonomian berkembang di suatu wilayah (baik negara atau wilayah yang lebih kecil), terdapat lebih banyak pendapatan untuk dibelanjakan, yang jika terdistribusi dengan baik diantara penduduk wilayah tersebut akan mengurangi kemiskinan. Dengan kata lain, secara teoritis pertumbuhan ekonomi memainkan peranan penting dalam mengurangi kemiskinan (Siregar dan Wahyuniarti, 2009).

2.1.5 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut Prof. Simon Kuznets (dikutip dari Budiono,1999) pertumbuhan ekonomi adalah kenaikan kapasitas dalam jangka panjang dari negara yang bersangkutan untuk menyediakan berbagai barang ekonomi kepada penduduknya. Kenaikan kapasitas itu sendiri ditentukan oleh adanya kemajuan atau penyesuaian teknologi, institusional (kelembagaan), dan ideologi terhadap berbagai tuntutan keadaan yang ada.

Hal tersebut menjadikan pertumbuhan ekonomi dicirikan dengan 3 hal pokok, antara lain:

1. laju pertumbuhan perkapita dalam arti nyata (riil).
2. persebaran atau distribusi angkatan kerja menurut sektor kegiatan produksi yang menjadi sumber nafkahnya.
3. pola persebaran penduduk.

Boediono (1999) menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi adalah salah satu proses kenaikan output per kapita dalam jangka panjang dimana penekanannya pada 3 aspek, antara lain:

1. Proses, yaitu pertumbuhan ekonomi bukan merupakan suatu gambaran dari suatu perekonomian yang melihat bagaimana suatu perekonomian berkembang atau berubah dari waktu ke waktu.
2. Output per kapita, yaitu pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan adanya kenaikan output per kapita dalam hal ini ada dua unsur yang penting seperti output total dan jumlah penduduk.
3. Jangka waktu, yaitu kenaikan output per kapita selama 1 – 2 tahun lalu diikuti penurunan output per kapita bukan merupakan pertumbuhan ekonomi. Dikatakan tumbuh bila dalam jangka waktu yang lama (5 tahun atau lebih) mengalami kenaikan output per kapita.

Menurut Todaro (Tambunan, 2001) sampai akhir tahun 1960, para ahli ekonomi percaya bahwa cara terbaik untuk mengejar keterbelakangan ekonomi adalah dengan meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi setinggi-tingginya sehingga

dapat melampaui tingkat pertumbuhan penduduk. Dengan cara tersebut, angka pendapatan per kapita akan meningkat sehingga secara otomatis terjadi pula peningkatan kemakmuran masyarakat dan pada akhirnya akan mengurangi jumlah penduduk miskin. Akibatnya, sasaran utama dalam pembangunan ekonomi lebih ditekankan pada usaha-usaha pencapaian tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Akan tetapi, pembangunan yang dilakukan pada negara yang sedang berkembang sering mengalami dilema antara pertumbuhan dan pemerataan. Pembangunan ekonomi mensyaratkan pendapatan nasional yang lebih tinggi dan untuk itu tingkat pertumbuhan yang lebih tinggi merupakan pilihan yang harus diambil. Namun yang menjadi permasalahan bukan hanya soal bagaimana cara memacu pertumbuhan, tetapi juga siapa yang melaksanakan dan berhak menikmati hasilnya.

Robert Solow mengembangkan model pertumbuhan ekonomi yang disebut sebagai model pertumbuhan Solow. Model tersebut berangkat dari fungsi produksi agregat sebagai berikut (Dornbusch et al., 2004)

$$Y = A.F(K,L).....(2.1)$$

dimana Y adalah output nasional (wilayah). K adalah modal (kapital) fisik, L adalah tenaga kerja dan A merupakan teknologi. Y akan meningkat ketika input (K atau L, atau keduanya) meningkat. Faktor penting yang mempengaruhi pengadaan modal fisik adalah investasi. Y juga akan meningkat jika terjadi perkembangan dalam kemajuan teknologi yang terindikasi dari kenaikan A. Oleh karena itu, pertumbuhan perekonomian nasional dapat berasal dari pertumbuhan input dan perkembangan

kemajuan teknologi yang disebut juga sebagai pertumbuhan total faktor produktivitas.

Share dari setiap input terhadap output mencerminkan seberapa besar pengaruh dari setiap input tersebut terhadap pertumbuhan output. Hubungan ini dapat diperlihatkan oleh persamaan berikut:

$$\text{Output growth} = (\text{labor share} \times \text{labor growth}) + (\text{capital share} \times \text{capital growth}) + \text{technical progress} \dots \dots \dots (2.2)$$

Persamaan 2.2 menunjukkan bahwa perbedaan dalam besarnya sumbangan input- input tertentu terhadap pertumbuhan output di masing-masing negara atau provinsi menyebabkan perbedaan pertumbuhan ekonomi antar negara atau provinsi. Model Solow dapat diperluas sehingga mencakup sumberdaya alam sebagai salah satu inputnya. Dasar pemikirannya yaitu output nasional tidak hanya dipengaruhi oleh K dan L tetapi juga dipengaruhi oleh lahan pertanian atau sumberdaya alam lainnya seperti cadangan minyak. Perluasan model Solow lainnya adalah dengan memasukkan sumberdaya manusia sebagai modal. Dalam literatur, teori pertumbuhan seperti ini terkategori sebagai teori pertumbuhan endogen dengan pionirnya *Lucas dan Romer*. Lucas menyatakan bahwa akumulasi modal manusia, sebagaimana akumulasi modal fisik, menentukan pertumbuhan ekonomi; sedangkan Romer berpandangan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh tingkat modal manusia melalui pertumbuhan teknologi.

Secara sederhana, dengan demikian, fungsi produksi agregat dapat dimodifikasi menjadi sebagai berikut:

$$Y = A.F(K,H,L) \dots\dots\dots(2.3)$$

Pada persamaan di atas, H adalah sumberdaya manusia yang merupakan akumulasi dari pendidikan dan pelatihan. Menurut (Mankiw, 2004) kontribusi dari setiap input pada persamaan tersebut terhadap output nasional bersifat proporsional. Suatu negara yang memberikan perhatian lebih kepada pendidikan terhadap masyarakatnya ceteris paribus akan menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang lebih baik dari pada yang tidak melakukannya. Dengan kata lain, investasi terhadap sumberdaya manusia melalui kemajuan pendidikan akan menghasilkan pendapatan nasional atau pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Apabila investasi tersebut dilaksanakan secara relatif merata, termasuk terhadap golongan berpendapatan rendah, maka kemiskinan akan berkurang.

2.1.6 Kesehatan dalam Pembangunan

Pada tingkat mikro yaitu pada tingkat individual dan keluarga, kesehatan adalah dasar bagi produktivitas kerja dan kapasitas untuk belajar di sekolah. Tenaga kerja yang sehat secara fisik dan mental akan lebih enerjik dan kuat, lebih produktif, dan mendapatkan penghasilan yang tinggi. Keadaan ini terutama terjadi di negara-negara sedang berkembang, di mana proporsi terbesar dari angkatan kerja masih bekerja secara manual. Di Indonesia sebagai contoh, tenaga kerja laki-laki yang menderita anemia menyebabkan 20% kurang produktif jika dibandingkan

dengan tenaga kerja laki-laki yang tidak menderita anemia. Selanjutnya, anak yang sehat mempunyai kemampuan belajar lebih baik dan akan tumbuh menjadi dewasa yang lebih terdidik. Dalam keluarga yang sehat, pendidikan anak cenderung untuk tidak terputus jika dibandingkan dengan keluarga yang tidak sehat.

Pada tingkat makro, penduduk dengan tingkat kesehatan yang baik merupakan masukan (*input*) penting untuk menurunkan kemiskinan, pertumbuhan ekonomi, dan pembangunan ekonomi jangka panjang. Beberapa pengalaman sejarah besar membuktikan berhasilnya tinggal landas ekonomi seperti pertumbuhan ekonomi yang cepat didukung oleh terobosan penting di bidang kesehatan masyarakat, pemberantasan penyakit dan peningkatan gizi. Hal ini antara lain terjadi di Inggris selama revolusi industri, Jepang dan Amerika Selatan pada awal abad ke-20, dan pembangunan di Eropa Selatan dan Asia Timur pada permulaan tahun 1950-an dan tahun 1960-an (Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, Desember 2001).

Angka Harapan Hidup (AHH), dijadikan indikator dalam mengukur tingkat kesehatan suatu individu di suatu daerah. Angka harapan hidup saat lahir adalah rata-rata tahun hidup yang akan dijalani oleh bayi yang baru lahir pada suatu tahun tertentu (BPS, 2005). Angka Harapan Hidup merupakan alat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk pada umumnya, dan meningkatkan derajat kesehatan pada khususnya. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu daerah harus diikuti dengan program pembangunan

kesehatan, dan program sosial lainnya termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan kalori termasuk program pemberantasan kemiskinan.

Peningkatan kesejahteraan ekonomi sebagai akibat dari bertambah panjangnya usia sangatlah penting. Dalam membandingkan tingkat kesejahteraan antar kelompok masyarakat, sangatlah penting untuk melihat angka harapan hidup, seperti halnya dengan tingkat pendapatan tahunan. Di negara-negara yang tingkat kesehatannya lebih baik, setiap individu memiliki rata-rata hidup lebih lama, dengan demikian secara ekonomis mempunyai peluang untuk memperoleh pendapatan lebih tinggi. Keluarga yang usia harapan hidupnya lebih panjang, cenderung untuk menginvestasikan pendapatannya di bidang pendidikan dan menabung. Dengan demikian, tabungan nasional dan investasi akan meningkat, dan pada gilirannya akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan menurunkan tingkat kemiskinan.

2.1.7 Pengaruh PDRB perkapita Terhadap Kemiskinan

PDRB menurut BPS adalah semua barang dan jasa sebagai hasil dari kegiatan-kegiatan ekonomi yang beroperasi di wilayah domestik, tanpa memperhatikan apakah faktor produksinya berasal dari atau dimiliki oleh penduduk daerah tersebut, merupakan produk domestik daerah yang bersangkutan. Pendapatan yang timbul oleh karena adanya kegiatan produksi tersebut merupakan pendapatan domestik.

Nilai bersih tersebut sebenarnya merupakan balas jasa dari faktor yang ikut serta dalam proses produksi yang terdiri dari upah, dan gaji, sewa tanah, bunga modal, keuntungan serta ditambah dengan penyusutan barang modal dan pajak tidak langsung netto (pajak tak langsung dikurangi subsidi). Balas jasa faktor produksi, penyusutan dan jasa tidak langsung netto tadi dalam pergerakan sektoral disebut sebagai nilai tambah bruto sehingga PDRB atas harga pasar tersebut juga merupakan penjumlahan nilai tambah (*value added*) bruto dari seluruh kegiatan ekonomi.

PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan perkapita biasa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan (Arsyad, 1999). Semakin tinggi pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan pemerintah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah, maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut. Tingginya penerimaan daerah, diharapkan nantinya pemerintah daerah tersebut dapat mengatasi masalah kemiskinan daerahnya dengan baik.

Masalah kemiskinan di suatu negara tergantung pada dua faktor utama, yaitu: tingkat pendapatan rata-rata (per kapita), dan tingkat ketimpangan dalam pembagian pendapatan. Jelas, bahwa setinggi apa pun tingkat pendapatan nasional per kapita yang dicapai oleh suatu negara, selama distribusi pendapatan tidak merata, maka tingkat kemiskinan di negara tersebut pasti akan tetap parah. Demikian pula sebaliknya, seberapa pun distribusi pendapatan di suatu negara, jika tingkat

pendapatan nasional rata-ratanya tidak mengalami perbaikan, maka kemelaratan juga akan semakin meluas (Todaro, 2000).

2.1.8 Pengaruh Kesehatan Terhadap Kemiskinan

Kesehatan merupakan salah satu faktor yang menyebabkan kemiskinan. Berbagai indikator kesehatan di negara-negara berpendapatan rendah dan menengah jika dibandingkan dengan negara-negara berpendapatan tinggi, memperlihatkan bahwa angka kesakitan dan kematian secara kuat berkorelasi (Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, 2001).

Beberapa alasan meningkatnya beban penyakit pada penduduk miskin adalah: *Pertama*, penduduk miskin lebih rentan terhadap penyakit karena terbatasnya akses terhadap air bersih dan sanitasi serta kecukupan gizi. *Kedua*, penduduk miskin cenderung enggan mencari pengobatan walaupun sangat membutuhkan karena terdapatnya kesenjangan yang besar dengan petugas kesehatan, terbatasnya sumber daya untuk memenuhi kebutuhan dasar, dan terbatasnya pengetahuan untuk menghadapi serangan penyakit.

Konsekuensi ekonomi jika terjadi serangan penyakit pada anggota keluarga merupakan bencana jika untuk biaya penyembuhannya mengharuskan menjual aset yang mereka miliki atau berhutang. Hal ini akan menyebabkan keluarga jatuh kedalam kemiskinan, dan jika tidak bisa keluar dari hal ini akan mengganggu tingkat kesejahteraan seluruh anggota keluarga bahkan generasi berikutnya. Serangan penyakit yang tidak fatal dalam kehidupan awal akan

mempunyai pengaruh yang merugikan selama siklus hidup berikutnya. Pendidikan secara luas dikenal sebagai kunci dari pembangunan, tetapi masih belum dihargai betapa pentingnya kesehatan anak dalam pencapaian hasil pendidikan. Kesehatan yang buruk secara langsung menumknkan potensi kognitif dan secara tidak langsung mengurangi kemampuan sekolah. Penyakit dapat memelaratkan keluarga melalui menurunnya pendapatan, menurunnya angka harapan hidup, dan menurunnya kesejahteraan psikologis. Menurut Arum Atmawikarta (dikutip dari Laporan Komisi Kesehatan, 2001), inilah yang menjadikan kesehatan memiliki korelasi penting terhadap kemiskinan.

2.2 Penelitian Terdahulu

Beberapa penelitian tentang kemiskinan di berbagai negara telah dilakukan oleh sejumlah peneliti dengan daerah dan periode waktu yang berbeda pula, antara lain:

- 1) Dalam jurnal Kapsos (2004) yang membahas tentang estimasi kemiskinan serta proyeksi besarnya pekerja miskin sampai dengan tahun 2015 di dunia tingkat pertumbuhan GDP. Stephen Kapsos menggunakan variabel tingkat kemiskinan, GDP perkapita, dan angka harapan hidup. Dalam penelitian ini menggunakan panel data. Kesimpulan dari penelitian ini adalah Proyeksi kemiskinan di kalangan pekerja dunia yang disajikan dalam makalah ini mengungkapkan banyak tentang kemungkinan untuk mengurangi kemiskinan sejalan dengan MDGs. Sementara dari hasil

proyeksi, kemiskinan di dunia semakin meningkat, sehingga tidak sesuai dengan MDGs yaitu mengurangi tingkat kemiskinan.

- 2) Pada penelitian yang dilakukan oleh Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang menganalisis pengaruh serta dampak dari pertumbuhan ekonomi terhadap jumlah penduduk miskin Indonesia, hal ini dilakukan karena jumlah penduduk miskin akibat krisis belum berhasil dikurangi bahkan cenderung meningkat. Penelitian ini menggunakan data panel dan variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah kemiskinan, PDRB, tingkat inflasi, jumlah lulusan tingkat smp, sma, agrishare, industri share, dan dummy krisis. Kesimpulan dari penelitian adalah bahwa tidak hanya pertumbuhan ekonomi saja yang mampu mengurangi kemiskinan suatu daerah melainkan efek kebawah (*tickle down effect*).
- 3.) Penelitian Hidayat dan Patunru (2007) membahas tentang hubungan pertumbuhan ekonomi, ketidakmerataan pendapatan dan kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996-2005. Penelitian ini menggunakan panel data dan kesimpulannya adalah bahwa pertumbuhan ekonomi meningkatkan ketidakmerataan pendapatan, tetapi pertumbuhan ekonomi ini mampu mengurangi kemiskinan, bahkan peningkatan ketidakmerataan pendapatan yang merupakan eksese dari pertumbuhan ekonomi tidak mengganggu efektifitas pengurangan kemiskinan.
- 4) Dalam Penelitian Wijayanto (2010) yang membahas tentang pengaruh pengaruh PDRB, Pendidikan (melek huruf), pengangguran terhadap kemiskinan di Jawa

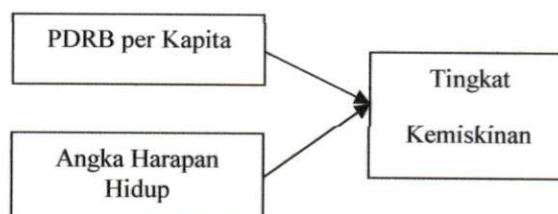
Tengah, dalam hal ini untuk seluruh kabupaten/kota di Jawa Tengah tahun 2005 – 2008. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa variabel PDRB berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pendidikan yang diproksi dengan angka melek huruf berpengaruh negatif signifikan terhadap tingkat kemiskinan, variabel pengangguran berpengaruh negatif serta signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Jawa Tengah.

- 5) Dalam penelitian Firdausi (2010) membahas tentang hubungan PDRB Perkapita dan Angka Harapan Hidup terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia serta proyeksi tingkat kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan panel data (2004-2008) dan kesimpulannya bahwa ada pengaruh signifikan antara PDRB Perkapita dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Indonesia dan diproyeksikan tingkat kemiskinan di Indonesia turun pada tahun 2015.

2.3 Kerangka Pemikiran Teoritis

Berdasarkan landasan teori dan kajian empiris terdahulu, maka dapat disusun kerangka pemikiran teori sebagai berikut :

Gambar 2.2 Kerangka Pemikiran Teori



Keterangan :

Objek utama penelitian ini melihat bagaimana proyeksi tingkat kemiskinan. Variabel independen dari penelitian ini adalah PDRB per kapita dan angka harapan hidup sedangkan variabel dependennya adalah Tingkat Kemiskinan.

2.4 Hipotesis

Hipotesis didefinisikan sebagai tafsiran yang dirumuskan serta diterima untuk sementara yang akan diuji kebenarannya (Nazir, 1998). Setelah adanya kerangka pemikiran di atas, maka penelitian ini dapat dibuat hipotesis sebagai berikut :

1. Diduga PDRB per kapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.
2. Diduga Angka Harapan Hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini digunakan data kuantitatif yang menurut sumbernya termasuk data sekunder. Data kuantitatif yaitu data yang berwujud kumpulan angka-angka sedangkan data sekunder merupakan data yang diperoleh tidak secara langsung. Data sekunder disini menggunakan data runtut waktu (*time series*) atau disebut juga data tahunan dan data antar ruang (*cross section*). Keseluruhan data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari Badan Pusat Statistik (BPS).

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data distribusi persentase penduduk miskin untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2009.
2. Data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita atas dasar harga konstan 2000 untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2009.
3. Data Angka Harapan Hidup untuk masing-masing Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat tahun 2005 - 2009.

Jenis data yang digunakan dalam studi ini adalah data *time series* dan data *cross section* atau sering disebut dengan data panel. Data panel merupakan sekelompok data individual yang diteliti selama rentang waktu tertentu sehingga data panel memberikan informasi observasi setiap individu dalam sampel. Keuntungan menggunakan panel data yaitu dapat meningkatkan jumlah sampel populasi dan

memperbesar *degree of freedom*, serta penggabungan informasi yang berkaitan dengan variabel *cross section* dan *time series*.

3.2 Pembentukan Model

Model *Ordinary Least Squares* pertama kali diperkenalkan oleh Carl Friedrich Gauss, seorang ahli matematika berkebangsaan Jerman (Mulyono, 2000:59). Dalam OLS, terdapat sepuluh asumsi yang harus dipenuhi, yang dikenal dengan asumsi klasik. Asumsi-asumsi ini meliputi:

1. *Linear Regression Model*, yang berarti model harus linier dalam parameter.
2. Nilai X (variabel bebas) adalah tetap (*nonstochastic*).
3. Nilai rata-rata e_i (*error term*) adalah nol (0).
4. Homoskedastisitas, yaitu varians masing-masing e_i (*error term*) adalah sama (konstan) untuk setiap X.
5. Tidak ada autokorelasi antar e_i (*error term*).
6. Tidak ada *covarians* antara e_i (*error term*) dan X (variabel bebas).
7. Jumlah observasi (n) harus lebih besar dari pada jumlah parameter untuk diestimasi.

Model penelitian yang digunakan dalam studi ini diadopsi dari model yang digunakan oleh Kapsos (2004). Berdasarkan permasalahan dan hipotesis, maka teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi kuadrat terkecil/ OLS. Model tersebut menyebutkan bahwa tingkat kemiskinan adalah fungsi dari PDRB perkapita dan angka harapan hidup, dapat ditulis sebagai berikut :

Dimana :

$$\text{KMSKN}_i = f(\text{PDRB}_i, \text{AHH}_i) \dots \dots \dots (3.1)$$

$$\text{KMSKN}_{it} = \beta_0 + \beta_1 \text{PDRB}_{kapit} + \beta_2 \text{AHH}_{it} + U_{it} \dots \dots \dots (3.2)$$

Dimana :

KMSKN = Tingkat Kemiskinan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

PDRB_{kap} = PDRB perkapita Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

AHH = Angka Harapan Kabupaten/Kota di Sumatera Barat

i = *cross section*

t = *time series*

β_0 = konstanta

$\beta_1, \beta_2, \beta_3$ = koefisien

U_i = *Disturbance error*

Estimasi model persamaan 3.2 tergantung pada asumsi yang kita buat mengenai intersep, koefisien kemiringan (*slope*), dan *error term*. Ada beberapa kemungkinan (Gujarati, 2003):

1. Asumsi bahwa intersep dan koefisien *slope* (kemiringan) adalah konstan antar waktu (*time*) dan ruang (*space*) dan error term mencakup perbedaan sepanjang waktu dan individu (ruang).
2. Koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar individu.
3. Koefisien *slope* konstan tapi *intersep* bervariasi antar waktu.
4. Koefisien *slope* konstan tetapi *intersep* bervariasi antar waktu dan individu (wilayah).

5. Seluruh koefisien (*intersep* dan koefisien *slope*) bervariasi antar individu (wilayah).

- Intersep dan Koefisien *slope* konstan

3.3 Definisi Operasional Variabel Dan Pengukurannya

Definisi operasional adalah suatu definisi yang diberikan kepada suatu variabel atau konstruk dengan cara memberikan arti atau menspesifikasikan kegiatan, ataupun memberikan suatu operasional yang diperlukan untuk mengukur konstruk atau variabel tersebut (Nazir, 1998). Sebagai panduan untuk melakukan penelitian dan dalam rangka pengujian hipotesis yang diajukan, maka perlu dikemukakan definisi variabel yang digunakan.

Penelitian ini menggunakan tingkat kemiskinan sebagai variabel dependen, sedangkan variabel independennya menggunakan PDRB per kapita dan angka harapan hidup.

1. Tingkat Kemiskinan

Tingkat kemiskinan adalah persentase penduduk miskin terhadap jumlah penduduk Kabupaten/Kota di provinsi Sumatera Barat. Data tingkat kemiskinan yang digunakan adalah Distribusi Jumlah Penduduk Miskin yang dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009. Variabel ini memiliki satuan persen.

2. PDRB Perkapita

PDRB perkapita adalah Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB) dibagi dengan jumlah penduduk masing-masing Kabupaten/Kota (BPS). Data PDRB perkapita yang digunakan adalah PDRB perkapita atas harga konstan tahun 2000 yang

dimulai dari tahun 2005 sampai dengan 2009. Variabel ini memiliki satuan jutaan rupiah.

3. Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup pada suatu umur x adalah rata-rata tahun hidup yang masih akan dijalani oleh seseorang yang telah berhasil mencapai umur x , pada suatu tahun tertentu, dalam situasi mortalitas yang berlaku di lingkungan masyarakatnya (BPS, 2010). Data Angka Harapan Hidup yang digunakan adalah Angka Harapan Hidup yang dimulai tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

3.4 Metode Pengolahan dan Analisis Data

Metode pengolahan yang digunakan untuk pengujian hipotesa adalah Ordinary Least Square (OLS) . Untuk mengolah model tersebut , maka digunakan software Eviews 6.0. Penggunaan Eviwes 6.0 dikarenakan software tersebut lebih cepat dalam pengolahan data panel serta penyajian hasil regresi yang mudah dimengerti. Adapun metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif dan kuantitatif statistik.

3.5 Uji Statistik

Setelah dilakukan uji asumsi klasik, dilakukanlah uji hipotesis. Jika model sudah bebas dari penyimpangan asumsi klasik, maka pengujian hipotesis dapat dilakukan. Pengujian hipotesis dilakukan dengan uji signifikasi (pengaruh nyata) variabel independen terhadap variabel dependen baik secara parsial maupun secara bersama-sama dilaukan dengan uji statistik t (t -test) dan uji F (F -test).

3.5.1 Pengujian Koefisien Regresi Secara Individual (Uji t)

Uji t dilakukan untuk melihat signifikansi dari pengaruh variabel bebas secara individual terhadap variabel terikat dengan menganggap variabel bebas lainnya adalah konstan. Uji t menggunakan hipotesis sebagai berikut (Gujarati, 2003) :

Hipotesis 1

Uji t untuk variabel PDRB perkapita

H0: $\beta_1 = 0$ (tidak ada hubungan linier antara PDRB perkapita dengan tingkat kemiskinan)

H1: $\beta_1 \neq 0$ (ada pengaruh negatif PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan)

Hipotesis 2

Uji t untuk variabel Angka Harapan Hidup

H0: $\beta_2 = 0$ (tidak ada hubungan linier antara angka harapan hidup dengan kemiskinan)

H1: $\beta_2 \neq 0$ (ada pengaruh negatif angka harapan hidup dengan kemiskinan)

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan pengujian yang digunakan adalah sebagai berikut: H0 ditolak apabila Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau $t_{hitung} < -t_{tabel}$, maka H0 ditolak artinya variabel bebas secara terpisah berpengaruh terhadap variabel tidak bebas. , yang berarti variabel independen (x) berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Nilai t-test ini akan bertanda positif bila koefisien regresi variabel bebas ditemukan positif, demikian pula sebaliknya, bila koefisien regresi variabel bebas ditemukan negatif berarti nilai t-test ini juga negatif, oleh karena itu dilakukan uji 2 sisi.

Keputusan ini dapat juga didasarkan pada perbandingan p -value dengan tingkat signifikasinya (α). Hipotesis nol ditolak jika nilai p -value lebih kecil dari nilai α . Hal ini berarti secara parsial variabel bebas ke i signifikan mempengaruhi variabel tidak bebasnya dengan tingkat kepercayaan $(1 - \alpha) \times 100\%$.

3.5.2 Pengujian Koefisien Regresi secara Serentak (Uji F)

Uji F dilakukan untuk mengetahui apakah variabel-variabel independen secara keseluruhan signifikan secara statistik dalam mempengaruhi variabel dependen. Apabila nilai F hitung lebih besar dari nilai F tabel maka variabel-variabel independen secara keseluruhan berpengaruh terhadap variabel dependen. Hipotesis yang digunakan :

$$H_0 : \beta_1 = \beta_2 = \beta_3 = \beta_4 = 0$$

H_1 : minimal ada satu koefisien regresi tidak sama dengan nol (Gujarati, 2003).

Pada tingkat signifikansi 5 persen dengan kriteria pengujian yang digunakan sebagai berikut:

1. H_0 diterima dan H_1 ditolak apabila $F_{hitung} < F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak atau bersama-sama tidak mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.
2. H_0 ditolak dan H_1 diterima apabila $F_{hitung} > F_{tabel}$, yang artinya variabel penjelas secara serentak dan bersama-sama mempengaruhi variabel yang dijelaskan secara signifikan.

3.5.3 Koefisien Determinasi R^2

Koefisien determinasi R^2 pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan diantara 0 dan 1 ($0 < R^2 < 1$), nilai (R^2) yang kecil berarti kemampuan variabel-variabel independent dalam menjelaskan variasi variabel independent sangat terbatas. Nilai yang mendekati 1 berarti variabel independent memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk memprediksi variasi model dependen (Gujarati, 2003).

Kelemahan mendasar penggunaan koefisien determinasi adalah bias terhadap jumlah variabel dependen, (R^2) pasti meningkat, tidak peduli apakah variabel tersebut berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen atau tidak. Oleh karena itu, banyak peneliti menganjurkan untuk menggunakan nilai *adjusted R* pada saat mengevaluasi model regresi terbaik. Tidak seperti nilai R^2 , nilai *adjusted R*² dapat naik dapat turun apabila satu variabel independent ditambahkan dalam model. Pengujian ini pada intinya adalah mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel independent.

3.6 Uji Asumsi Klasik

Dengan pemakaian metode OLS, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih tepat dengan estimasi yang BLUE (Best Linier Unbiased, Estimation), maka diperlukan pendeteksian apakah model tersebut menyimpang dari asumsi klasik atau tidak, deteksi tersebut terdiri dari :

a. Deteksi Normalitas

Regresi linier normal klasik mengasumsikan bahwa distribusi probabilitas

dari gangguan μ_t memiliki rata-rata yang diharapkan sama dengan nol, tidak berkorelasi dan mempunyai varian yang konstan. Dengan asumsi ini penaksir akan memenuhi sifat-sifat statistik yang diinginkan seperti *unbiased* dan memiliki varian yang minimum (Gujarati, 2003).

Ada beberapa metode untuk mengetahui normal atau tidaknya distribusi residual antara lain *Jarque-Bera Test* (J-B *Test*) dan metode grafik. Dalam penelitian ini akan menggunakan metode J-B *Test*, yang dilakukan dengan menghitung nilai *skewness* dan kurtosis, apabila Probabilitas J-B hitung $> 0,05$, maka nilai residual berdistribusi normal (Firmansyah, 2000).

b. Deteksi Autokorelasi

Autokorelasi diasumsikan sebagai unsur gangguan yang berhubungan dengan observasi tidak dipengaruhi oleh unsure disturbansi atau gangguan yang berhubungan dengan pengamatan lain yang manapun (Gujarati, 1995).

Autokorelasi pada umumnya lebih sering terjadi pada data *time series* walaupun dapat juga terjadi pada data *cross section*. Dalam data *time series*, observasi diurutkan menurut urutan waktu secara kronologis. Maka dari itu besar kemungkinan akan terjadi interkorelasi antara observasi yang berurutan, khususnya kalau interval antar dua observasi sangat pendek.

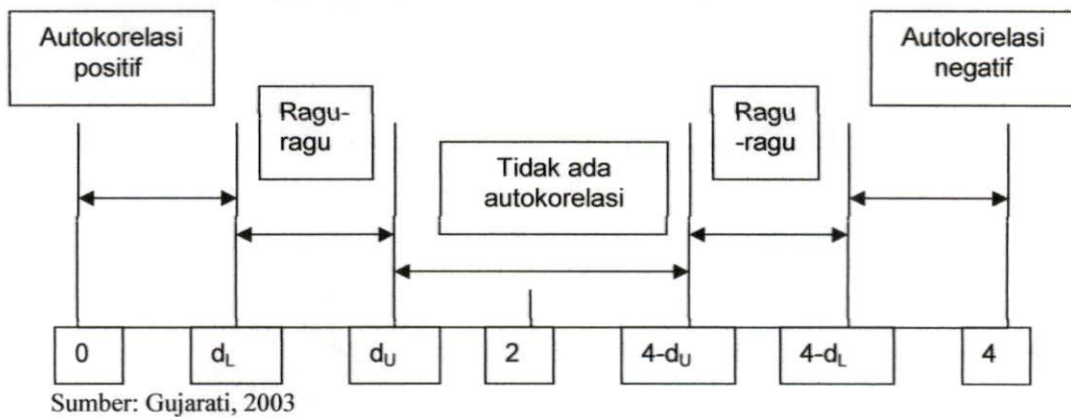
Salah satu uji formal yang paling populer untuk mendeteksi autokorelasi adalah uji Durbin-Watson yaitu dengan yaitu dengan cara membandingkan antara DW statistik (d) dengan d_L dan d_U , jika DW statistik berada diantara D_U dan $4 - D_U$ maka tidak ada autokorelasi.

Untuk kepentingan tersebut, DW telah mempunyai tabel yang digunakan sebagai

pembandingan uji DW yang dilakukan, sehingga dapat disimpulkan dengan tepat ada atau tidaknya autokorelasi. Dalam membandingkan hasil tersendiri. Untuk mempermudah dalam memahami cara melakukan perbandingan tersebut, perhatikan gambar berikut

Gambar 3.1

Aturan membandingkan Uji Durbin-Watson Dengan Tabel Durbin Watson



Tabel DW terdiri dari dua nilai, yaitu batas bawah (d_L) dan batas atas (d_U). Nilai-nilai ini dapat digunakan sebagai pembandingan uji DW, dengan aturan sebagai berikut :

- Bila $DW < d_L$; berarti ada korelasi yang positif atau kecenderungannya $\rho = 1$.
- Bila $d_L \leq DW \leq d_U$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apapun.
- Bila $d_U < DW < 4-d_U$; berarti tidak ada korelasi positif maupun negatif.
- Bila $4-d_U \leq DW \leq 4-d_L$; berarti kita tidak dapat mengambil kesimpulan apa-apa.
- Bila $DW > 4-d_L$; berarti ada korelasi negatif.

Apabila terjadi autokorelasi, salah satu cara untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi tersebut adalah dengan memasukkan *lag* variabel dependen kedalam model regresi. Misalnya pada model regresi :

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + e$$

yang diyakini terdapat autokorelasi, untuk menghilangkan pengaruh autokorelasi dalam model regresi tersebut dapat dilakukan dengan memasukkan *lag* variabel dependen (Kemiskinan) ke dalam model sehingga model regresi tersebut menjadi:

$$Y = \beta_0 + \beta_1 X1 + \beta_2 X2 + b_3 Y_{(t-1)} \text{ (Gujarati , 2003)}$$

c. Deteksi Multikolinearitas

Multikolinearitas berhubungan dengan situasi di mana ada hubungan linier baik yang pasti atau mendekati pasti di antara variabel independen (Gujarati, 2003). Masalah multikolinearitas timbul bila variabel-variabel independen berhubungan satu sama lain. Selain mengurangi kemampuan untuk menjelaskan dan memprediksi, multikolinearitas juga menyebabkan kesalahan baku koefisien (uji t) menjadi indikator yang tidak dipercaya.

Uji multikolinearitas bertujuan untuk melihat adanya hubungan linear antara variabel independen dalam model regresi. Jika menginginkan model yang bersifat BLUE (*Best Linear Unbiased Estimate*), maka tidak boleh terjadi multikolinearitas. Salah satu metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini yaitu dengan menggunakan *Corelation Matrix* (r) masing-masing variabel baik independen maupun dependen. Model dinyatakan terkena multikolinearitas jika $r \text{ (absolute)} > 0,85$ (Widarjono,2005).

d. Deteksi Heteroskedasitas

Salah satu asumsi dalam model regresi linier klasik adalah bahwa varians dari setiap *disturbance term* yang dibatasi oleh nilai tertentu, terbentuk suatu nilai konstan yang sama dengan σ^2 . Deteksi Heteroskedasitas bertujuan untuk menguji apakah *disturbance term* memiliki varians yang sama atau tidak dalam model persamaan regresi. Deteksi Heteroskedasitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain.

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas (variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan), maka dalam penelitian ini menggunakan Uji *white heteroscedasticity no cross term* dimana jika chi-squared probability (Obs*R squared) > 0,05 berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

BAB IV

GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Provinsi Sumatera Barat

Provinsi Sumatera Barat terletak $0^{\circ} 54^{\circ}$ Lintang Utara dan $3^{\circ} 30^{\circ}$ Lintang Selatan dan dari $98^{\circ} 36^{\circ}$ sampai $101^{\circ} 53^{\circ}$ Bujur Timur. Luas Sumatera Barat sekitar 42.297,30 km² atau 2,17% dari luas Indonesia. Secara administratif Provinsi Sumatera Barat terdiri atas 12 Kabupaten dan 7 Kota yaitu Kabupaten Kepulauan Mentawai, Kabupaten Pesisir Selatan, Kabupaten Solok, Kabupaten Sijunjung, Kabupaten Tanah Datar, Kabupaten Padang Pariaman, Kabupaten Agam, Kabupaten Lima Puluh Kota, Kabupaten Pasaman, Kabupaten Solok Selatan, Kabupaten Dharmasraya, Kabupaten Pasaman Barat, Kota Padang, Kota Solok, Kota Sawahlunto, Kota Padang Panjang, Kota Bukittinggi, Kota Payakumbuh, dan Kota Pariaman.

4.2 Perkembangan Tingkat Kemiskinan Di Provinsi Sumatera Barat

Kemiskinan tidak lagi dipahami hanya sebatas ketidakmampuan ekonomi, tetapi juga kegagalan memenuhi hak-hak dasar dan perbedaan perlakuan bagi seseorang atau sekelompok orang dalam menjalani kehidupan secara bermartabat. Oleh karena itu, pemerintah sangat berupaya keras untuk mengatasi permasalahan kemiskinan tersebut sehingga pembangunan dilakukan secara terus-menerus termasuk dalam menentukan batas ukur untuk mengenali siapa si miskin tersebut. Tabel 4.1 disajikan data tingkat kemiskinan 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Tabel 4.1 Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2005-2009

No	KABUPATEN/KOTA	TINGKAT KEMISKINAN (%)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab.Kep.Mentawai	19.26	16.87	15.99	22.86	20.54
2	Kab.Pesisir Selatan	12.43	14.76	13.21	11.36	10.56
3	Kab.Solok	15.28	17.98	17.59	13.43	12.15
4	Kab.Sijunjung	13.94	15.96	15.35	11.51	9.80
5	Kab.Tanah Datar	6.19	7.61	7.72	7.52	6.93
6	Kab.Padang Pariaman	14.67	17.45	17.12	14.15	12.41
7	Kab.Agam	13.36	13.93	12.59	11.20	9.86
8	Kab.Lima Puluh Kota	13.37	16.19	14.79	11.01	9.98
9	Kab.Pasaman	15.63	18.34	17.92	14.44	12.47
10	Kab.Solok Selatan	15.42	17.65	17.43	13.41	11.66
11	Kab.Dharmasraya	13.01	14.93	14.42	12.53	11.40
12	Kab.Pasaman Barat	12.00	14.12	13.76	10.96	9.61
13	Kota.Padang	4.41	5.15	4.97	6.40	5.72
14	Kota.Solok	4.08	4.86	4.59	7.32	6.76
15	Kota.Sawahlunto	5.21	2.86	2.25	1.94	2.42
16	Kota.Padang Panjang	4.74	4.94	5.19	8.24	7.58
17	Kota.Bukittinggi	4.97	5.12	5.23	7.20	6.19
18	Kota.Payakumbuh	6.46	7.88	7.77	10.96	10.15
19	Kota.Pariaman	8.36	7.86	5.87	5.33	5.48

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2009

Berdasarkan tabel tingkat kemiskinan diatas pada tahun 2005 tingkat kemiskinan untuk Kabupaten Kepulauan Mentawai (19,26 %), Kabupaten Pesisir Selatan (12,43 %), Kabupaten Solok (15,28 %), Kabupaten Sijunjung (13,94 %), Kabupaten Tanah Datar (6,19 %), Kabupaten Padang Pariaman (14,67 %), Kabupaten Agam (13,36 %), Kabupaten Lima Puluh Kota (13,37 %), Kabupaten Pasaman (15,63 %), Kabupaten Solok Selatan (15,42 %), Kabupaten Dharmasraya (13,01%) dan Kabupaten Pasaman Barat (12 %). Sedangkan untuk tingkat kemiskinan Kota Padang (4,41 %), Kota Solok (4,08 %), Kota Sawahlunto (5,21 %), Kota Padang Panjang (4,74 %), Kota Bukittinggi (4,97 %), Kota Payakumbuh

(6,46 %) dan Kota Pariaman (8,36 %). Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang paling tinggi tingkat kemiskinanya adalah Kabupaten Kepulauan Mentawai dengan 19,26 Persen. Sedangkan yang paling rendah adalah kota Solok dengan tingkat kemiskinan sebesar 4,08 persen.

Pada tahun 2006 rata-rata terjadi kenaikan tingkat kemiskinan untuk masing-masing kabupaten/kota. Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa yang paling tinggi tingkat kemiskinanya adalah Kabupaten Pasaman dengan 18,34 Persen. Sedangkan yang paling rendah adalah kota Solok dengan tingkat kemiskinan sebesar 2,86 persen.

Selanjutnya pada tahun 2007, 2008, dan 2009 terjadi penurunan tingkat kemiskinan, dimana pada tahun 2009 Kota Sawahlunto berhasil menurunkan tingkat kemiskinan pada level 2,42 %. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Mentawai merupakan tingkat kemiskinan yang paling tinggi dengan 20,54 %. Selanjutnya dalam tabel 4.2 disajikan laju pertumbuhan tingkat kemiskinan Kabupaten/kota di Sumatera Barat.

**Tabel 4.2 Laju Pertumbuhan Tingkat Kemiskinan (%)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2006-2009**

No	KABUPATEN/KOTA	LAJU PERTUMBUHAN TINGKAT KEMISKINAN (%)			
		2006	2007	2008	2009
1	Kab.Kep.Mentawai	-12.41	-5.22	42.96	-10.149
2	Kab.Pesisir Selatan	18.74	-10.50	-14.00	-7.0423
3	Kab.Solok	17.67	-2.17	-23.65	-9.5309
4	Kab.Sijunjung	14.49	-3.82	-25.02	-14.857
5	Kab.Tanah Datar	22.94	1.45	-2.59	-7.8457
6	Kab.Padang Pariaman	18.95	-1.89	-17.35	-12.297
7	Kab.Agam	4.27	-9.62	-11.04	-11.964
8	Kab.Lima Puluh Kota	21.09	-8.65	-25.56	-9.3551
9	Kab.Pasaman	17.34	-2.29	-19.42	-13.643
10	Kab.Solok Selatan	14.46	-1.25	-23.06	-13.05
11	Kab.Dharmasraya	14.76	-3.42	-13.11	-9.0184
12	Kab.Pasaman Barat	17.67	-2.55	-20.35	-12.318
13	Kota.Padang	16.78	-3.50	28.77	-10.625
14	Kota.Solok	19.12	-5.56	59.48	-7.6503
15	Kota.Sawahlunto	-45.11	-21.33	-13.78	24.7423
16	Kota.Padang Panjang	4.22	5.06	58.77	-8.0097
17	Kota.Bukittinggi	3.02	2.15	37.67	-14.028
18	Kota.Payakumbuh	21.98	-1.40	41.06	-7.3905
19	Kota.Pariaman	-5.98	-25.32	-9.20	2.81426

Sumber : BPS, Data dan Informasi Kemiskinan 2005-2009, diolah

Berdasarkan tabel 4.2 tanda negatif berarti terjadi penurunan tingkat kemiskinan dan tanda positif mengalami kenaikan tingkat kemiskinan, dari data diatas dapat dilihat bahwa tingkat 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2005 sampai tahun 2006 hampir semuanya mengalami kenaikan tingkat kemiskinan kecuali Kepulauan Mentawai dan Kota Sawahlunto . Peningkatan jumlah penduduk miskin selama 2005-2006 terjadi karena naiknya harga minyak dunia, sehingga pemerintah mengambil kebijakan untuk menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang diikuti kenaikan harga barang-barang kebutuhan pokok selama periode tersebut naik tinggi, yang digambarkan oleh laju inflasi umum sebesar 20,47 persen. Akibatnya penduduk yang tergolong tidak miskin

namun penghasilannya berada di sekitar garis kemiskinan banyak yang bergeser posisinya menjadi miskin. Tetapi di tahun 2007, terjadi penurunan tingkat kemiskinan yang cukup signifikan hampir di semua Kabupaten/Kota kecuali Tanah Datar, Padang Panjang dan Bukittinggi yang laju pertumbuhan tingkat kemiskinannya positif.

Sementara kondisi kemiskinan dari tahun 2008 mengalami fluktuasi diantara Kabupaten/Kota yang mengalami kenaikan tingkat kemiskinan adalah Kep. Mentawai, Padang, Solok, Padang Panjang, Bukittinggi dan Payakumbuh. Terjadi kenaikan tingkat kemiskinan dari beberapa Kabupaten/Kota di Sumatera Barat dikarenakan dampak gempa mentawai yang mengguncang Sumatera Barat Pada tahun 2007 hal ini berdampak terhadap tingkat kemiskinan yang cukup tinggi di Beberapa Daerah di Sumatera Barat terutama di Kepulauan Mentawai.

Pada tahun 2009 tingkat kemiskinan sudah berangsur membaik, walaupun masih ada Kabupaten/Kota yang laju pertumbuhan kemiskinannya positif yaitu kotaswahlunto dan pariaman. Kondisi yang berangsur membaik terbukti dengan angka persentase tingkat kemiskinan Sumatera Barat yang terus menurun dan di bawah dua digit yakni 9,45%. Hal ini disebabkan karena tingkat inflasi yang relatif stabil, menurunnya harga kebutuhan pokok terutama beras, dan meningkatnya rata-rata upah nominal dan upah riil harian buruh tani (BPS, 2009). Untuk mengurangi tingkat kemiskinan di Sumatera Barat perlu diketahui sebenarnya faktor-faktor apa sajakah yang berhubungan atau mempengaruhi tinggi rendahnya tingkat kemiskinan di Sumatera Barat sehingga ke depannya dapat diformulasikan sebuah kebijakan publik yang efektif untuk mengurangi

tingkat kemiskinan di negara ini dan tidak hanya sekedar penurunan angka-angka saja melainkan secara kualitatif juga.

4.3 Perkembangan PDRB Perkapita Sumatera Barat

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah jumlah dan jasa akhir yang dihasilkan oleh berbagai kegiatan ekonomi di suatu daerah dalam suatu periode tertentu, biasanya satu tahun (BPS). PDRB perkapita diperoleh dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk. Pendapatan perkapita seringkali digunakan sebagai indikator pembangunan. Pendapatan perkapita bisa memberikan gambaran tentang tingkat kesejahteraan (Arsyad, 1999). Semakin tinggi tingkat pendapatan seseorang maka akan semakin tinggi pula kemampuan seseorang untuk membayar (*ability to pay*) berbagai pungutan yang ditetapkan oleh pemerintah. Semakin tinggi PDRB perkapita suatu daerah maka semakin besar pula potensi sumber penerimaan daerah tersebut (Thamrin, 2000). Melalui data PDRB dapat pula diketahui kondisi perekonomian regional suatu daerah. Dalam Tabel 4.3 disajikan data PDRB perkapita atas harga konstan 2000 di 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009.

Tabel 4.3 PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat (Juta Rupiah) Tahun 2005 – 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	PDRB Perkapita ADHK 2000 (Juta Rupiah)				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kep.Mentawai	6.55	6.73	6.93	7.15	7.39
2	Kab. Pesisir Selatan	3.84	3.98	4.13	4.29	4.46
3	Kab. Solok	4.69	4.91	5.15	5.42	5.69
4	Kab. Sijunjung	5.43	5.62	5.79	5.96	6.15
5	Kab. Tanah Datar	5.89	6.21	6.57	6.94	7.33
6	Kab. Padang Pariaman	5.20	6.15	6.47	6.83	7.05
7	Kab. Agam	5.47	5.78	6.13	6.50	6.80
8	Kab. Lima Puluh Kota	6.54	6.89	7.28	7.67	8.04
9	Kab. Pasaman	4.18	4.34	4.52	4.72	4.93
10	Kab. Solok Selatan	3.83	4.00	4.19	4.39	4.59
11	Kab. Dharmasraya	5.12	5.28	5.45	5.64	5.84
12	Kab. Pasaman Barat	6.27	6.56	6.87	7.19	7.52
13	Kota. Padang	11.37	11.68	12.13	12.60	12.96
14	Kota. Solok	7.24	7.50	7.79	8.10	8.32
15	Kota. Sawahlunto	8.38	8.40	8.51	8.74	9.04
16	Kota. Padang Panjang	6.50	6.62	6.75	6.88	7.02
17	Kota. Bukittinggi	7.57	7.90	8.27	8.67	8.99
18	Kota. Payakumbuh	6.25	6.57	6.93	7.31	7.65
19	Kota. Pariaman	8.01	8.38	8.82	9.29	9.69

Sumber : BPS Sumatera Barat

Dalam tabel 4.3 PDRB perkapita 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009, rata-rata di tiap Kabupaten/Kota mengalami tren yang meningkat. Peningkatan di dalam PDRB perkapita disebabkan karena adanya peningkatan pendapatan yang berasal dari sumber-sumber penerimaan daerah yang merupakan balas jasa dari berbagai kegiatan ekonomi. PDRB perkapita tertinggi pada tahun 2009 adalah Kota Padang dengan 12,96 Juta dikarenakan kota padang masih sebagai kota utama dalam provinsi Sumatera Barat dan juga kegiatan ekonomi dakam sektor Industri, Perdagangan dan Jasa yang memiliki produktifitas tinggi dibandingkan dengan sektor

pertanian. dan terendah adalah pesisir selatan dengan PDRB Per Kapita 4,46 Juta Rupiah.

Tabel 4.4 Laju Pertumbuhan (%) PDRB Perkapita Atas Dasar Harga Konstan Tahun 2000 Dan Kabupaten/Kota Di Sumatera Barat Tahun 2006 – 2009

NO	KABUPATEN/KOTA	Laju Pertumbuhan PDRB Perkapita (%)			
		2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kep.Mentawai	2.75	2.97	3.17	3.36
2	Kab. Pesisir Selatan	3.65	3.77	3.87	3.96
3	Kab. Solok	4.69	4.89	5.24	4.98
4	Kab. Sijunjung	3.50	3.02	2.94	3.19
5	Kab. Tanah Datar	5.43	5.80	5.63	5.62
6	Kab. Padang Pariaman	18.27	5.20	5.56	3.22
7	Kab. Agam	5.67	6.06	6.04	4.62
8	Kab. Lima Puluh Kota	5.35	5.66	5.36	4.82
9	Kab. Pasaman	3.83	4.15	4.42	4.45
10	Kab. Solok Selatan	4.44	4.75	4.77	4.56
11	Kab. Dharmasraya	3.13	3.22	3.49	3.55
12	Kab. Pasaman Barat	4.63	4.73	4.66	4.59
13	Kota. Padang	2.73	3.85	3.87	2.86
14	Kota. Solok	3.59	3.87	3.98	2.72
15	Kota. Sawahlunto	0.24	1.31	2.70	3.43
16	Kota. Padang Panjang	1.85	1.96	1.93	2.03
17	Kota. Bukittinggi	4.36	4.68	4.84	3.69
18	Kota. Payakumbuh	5.12	5.48	5.48	4.65
19	Kota. Pariaman	4.62	5.25	5.33	4.31

Sumber : BPS Sumatera Barat,diolah

PDRB dapat digunakan untuk menghitung tingkat pertumbuhan ekonomi suatu daerah. Tingkat pertumbuhan PDRB Perkapita disebut juga tingkat pertumbuhan ekonomi penduduk dalam suatu daerah . Pada tahun 2006-2009 laju pertumbuhan PDRB Perkapita Kabuapten/kota terus mengalami kenaikan.

Pada Tahun 2006 laju pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi adalah kabupaten Padang Pariaman sebesar 18,27 % dan yang terendah adalah Kota

Sawahlunto sebesar 0,24 % akibat tidak beroperasinya tambang batubara ombilin yang merupakan sebahagian dari pendapatan masyarakat.

Jika diukur dengan laju pertumbuhan dalam tabel 4.4, maka laju pertumbuhan PDRB perkapita tertinggi tahun 2009 adalah Kabupaten Tanah Datar , laju pertumbuhannya sebesar 5,62 persen. Sedangkan Kabupaten/Kota yang memiliki laju pertumbuhan terendah pada tahun 2009 adalah Kota Padang Panjang dengan 0.24 % hal ini dikarenakan kegiatan ekonomi yang sebagian besar adalah komoditi tanaman pangan tradisional, khususnya padi dan palawija yang harganya relatif stabil.

4.4 Perkembangan Angka Harapan Hidup

Perkembangan Angka Harapan Hidup sering dipakai sebagai salah satu indikator kesehatan masyarakat suatu daerah. Dengan asumsi semakin panjang angka harapan hidup seseorang di suatu daerah maka menunjukkan adanya peningkatan kehidupan dan kesejahteraan bagi masyarakat di daerah tersebut. Berikut dalam tabel 4.5 disajikan Angka Harapan Hidup 19 Kabupaten/Kota di Sumatera Barat pada tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dalam tabel 4.6 disajikan Laju Pertumbuhan angka Harapan Hidup tahun 2006-2009.

**Tabel 4.5 Angka Harapan Hidup (Tahun)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2005-2009**

NO	KABUPATEN/KOTA	ANGKA HARAPAN HIDUP				
		2005	2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kep.Mentawai	68.40	68.10	68.24	68.28	68.36
2	Kab. Pesisir Selatan	65.40	66.20	66.54	66.75	67.03
3	Kab. Solok	64.60	65.20	65.65	65.90	66.25
4	Kab. Sijunjung	65.20	65.60	65.99	66.25	66.58
5	Kab. Tanah Datar	69.40	69.50	69.94	70.22	70.58
6	Kab. Padang Pariaman	66.30	67.20	67.63	67.92	68.28
7	Kab. Agam	67.80	68.30	68.56	68.67	68.85
8	Kab. Lima Puluh Kota	66.70	67.00	67.42	67.72	68.08
9	Kab. Pasaman	66.30	66.10	66.50	66.76	67.10
10	Kab. Solok Selatan	63.20	64.10	64.32	64.35	64.48
11	Kab. Dharmasraya	64.10	65.00	65.31	65.50	65.75
12	Kab. Pasaman Barat	63.80	64.10	64.42	64.62	64.88
13	Kota. Padang	69.50	69.90	70.21	70.39	70.64
14	Kota. Solok	68.60	69.00	69.23	69.34	69.51
15	Kota. Sawahlunto	70.60	70.80	70.96	71.22	71.44
16	Kota. Padang Panjang	69.70	69.90	70.32	70.60	70.95
17	Kota. Bukittinggi	70.80	70.90	71.12	71.22	71.37
18	Kota. Payakumbuh	69.80	70.00	70.21	70.31	70.46
19	Kota. Pariaman	67.70	68.10	68.15	68.56	68.79

Sumber : BPS Sumatera Barat

Tabel 4.5 dapat dilihat rata-rata angka harapan hidup selama tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 mengalami peningkatan. Hal ini disebabkan oleh tingkat kesehatan masyarakat yang meningkat, pemerintah diduga telah mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya terutama di bidang kesehatan.

Dilihat secara nominal dalam tabel 4.5 angka harapan hidup tertinggi rata-rata terjadi pada Kota Bukittinggi dan Kota Sawahlunto yaitu sebesar 71 tahun. Naiknya angka harapan hidup menurut Gubernur Sumatera Barat dalam Koran Jakarta (2008) menunjukkan kegiatan pembangunan bidang kesehatan di Sumbar

secara umum telah terwujud dan berdampak pada tingkat kesehatan masyarakat. Peningkatan Angka Harapan Hidup di setiap tahunnya diharapkan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dengan kesejahteraan yang semakin meningkat, maka tingkat kemiskinan diharapkan dapat berkurang

**Tabel 4.6 Laju Pertumbuhan Angka Harapan Hidup (Persen)
Kabupaten/Kota di Sumatera Barat
Tahun 2006-2009**

NO	KABUPATEN/KOTA	Laju Pertumbuhan Angka Harapan Hidup(%)			
		2006	2007	2008	2009
1	Kab. Kep.Mentawai	-0.44	0.21	0.06	0.12
2	Kab. Pesisir Selatan	1.22	0.51	0.32	0.42
3	Kab. Solok	0.93	0.69	0.38	0.53
4	Kab. Sijunjung	0.61	0.59	0.39	0.50
5	Kab. Tanah Datar	0.14	0.63	0.40	0.51
6	Kab. Padang Pariaman	1.36	0.64	0.43	0.53
7	Kab. Agam	0.74	0.38	0.16	0.26
8	Kab. Lima Puluh Kota	0.45	0.63	0.44	0.53
9	Kab. Pasaman	-0.30	0.61	0.39	0.51
10	Kab. Solok Selatan	1.42	0.34	0.05	0.20
11	Kab. Dharmasraya	1.40	0.48	0.29	0.38
12	Kab. Pasaman Barat	0.47	0.50	0.31	0.40
13	Kota. Padang	0.58	0.44	0.26	0.36
14	Kota. Solok	0.58	0.33	0.16	0.25
15	Kota. Sawahlunto	0.28	0.23	0.37	0.31
16	Kota. Padang Panjang	0.29	0.60	0.40	0.50
17	Kota. Bukittinggi	0.14	0.31	0.14	0.21
18	Kota. Payakumbuh	0.29	0.30	0.14	0.21
19	Kota. Pariaman	0.59	0.07	0.60	0.34

Sumber : BPS Sumatera Barat, Diolah

Laju pertumbuhan angka harapan hidup tertinggi terjadi pada Kabupaten Solok Selatan di tahun 2006 sebesar 1,42 persen dan yang terendah adalah Kep. Mentawai dengan laju pertumbuhan -0,44%. Laju pertumbuhan angka harapan hidup tertinggi di tahun 2007 adalah Kabupaten solok yaitu sebesar 0,69 persen. Pada tahun 2008 Laju pertumbuhan angka harapan hidup tertinggi adalah

Kabupaten Lima Puluh Kota yaitu sebesar 0,44%. Selanjutnya pada tahun 2009 Laju pertumbuhan angka harapan hidup tertinggi adalah Kabupaten Solok, Padang Pariaman dan Lima Puluh Kota yaitu masing-masing sebesar 0,53%.

BAB V

HASIL EMPIRIS

5.1 Hasil Regresi

Pada bab ini penulis akan mengemukakan secara kuantitatif bagaimana pengaruh nilai PDRB Perkapita dan angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat periode waktu 2005-2009 dengan menggunakan time series cross section data . Variabel-variabel tersebut diregresi dengan metode Ordinary Least Square (OLS).

Hasil penelitian yang diperoleh adalah

$$\text{KMSKN} = 122,08 - 0,76 \text{ PDRBkap} - 1,06 \text{ AHH} \quad (\text{Persamaan 3.2})$$

$$\text{T-test} = (6,86) \quad (3,16) \quad (5,21)$$

$$R^2 = 0.53$$

$$\text{F-statistic} = 52,39$$

$$\text{F-tabel} = 3,10$$

Dari penemuan studi penulis memperoleh Koefisien Determinasi (R^2) sebesar 0,53 yang berarti secara keseluruhan variabel bebas dalam persamaan tersebut mampu menjelaskan perubahan tingkat kemiskinan sebesar 53 % selama kurun waktu penelitian, sedangkan sisanya 47 % ditentukan oleh variabel lain yang tidak diperhitungkan didalam model. Nilai uji statistik-F yang diperoleh dari pengujian secara empiris pada tingkat kepercayaan 95 % adalah sebesar 52,39 sedangkan F-tabel dihitung dengan cara $df1 = k-1$, dan $df2 = n-k$, dimana k adalah jumlah variabel dependen dan variabel independen, sedangkan n adalah

jumlah data sehingga didapatkan nilai F-tabel $(2,92)$ sebesar 3,10. Hal ini berarti bahwa nilai $F\text{-test} > F\text{-tabel}$ dan bisa dinyatakan bahwa PDRB perkapita dan angka harapan hidup secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap tingkat kemiskinan di Sumatera Barat secara statistik pada tingkat kepercayaan 95 %.

Variabel PDRB perkapita terhadap tingkat kemiskinan, diperoleh koefisien regresi sebesar -0,76 yang berarti PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan Sumatera Barat artinya kenaikan 1 Juta rupiah pada PDRB perkapita akan menurunkan tingkat kemiskinan sebesar 0,75 % dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai T-test yang diperoleh yaitu sebesar 3,16 dan T-tabel dihitung dengan cara $= \alpha/2$, dan $df2 = n-k$ sehingga nilai T-tabel $(0,025, 92)$ yaitu 1,98 sehingga diketahui nilai $T\text{-test} > T\text{-tabel}$. Hasil ini menunjukkan bahwa PDRB perkapita signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan teori pertumbuhan ekonomi Kuznet dalam Tulus Tambunan (2001), pertumbuhan dan kemiskinan mempunyai korelasi yang sangat kuat, karena pada tahap awal proses pembangunan kemiskinan cenderung meningkat dan pada saat mendekati tahap akhir pembangunan jumlah orang miskin berangsur-angsur berkurang serta sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kapsos (2004) serta Siregar dan Wahyuniarti (2008) yang menunjukkan PDRB perkapita berpengaruh negatif terhadap tingkat kemiskinan.

Sedangkan untuk variabel angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan, diperoleh koefisien regresi sebesar -1,06 yang berarti kenaikan 1 tahun pada Angka Harapan Hidup, maka akan menurunkan Tingkat kemiskinan 1,06 % dengan asumsi variabel lainnya tetap. Nilai T-test yang diperoleh yaitu

sebesar 5,21 dan T-tabel dihitung dengan cara $\alpha/2$, dan $df_2 = n-k$ sehingga nilai T-tabel $(0,025, 92)$ yaitu 1,98 sehingga diketahui nilai T-test > T-tabel. Hasil ini menunjukkan bahwa angka harapan hidup signifikan mempengaruhi tingkat kemiskinan.

Hasil empiris ini sesuai dengan hipotesis yang menyatakan bahwa angka harapan hidup memiliki hubungan negatif dengan tingkat kemiskinan dan penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kapsos (2004) dan Firdausi (2010) mengenai adanya pengaruh negatif dari angka harapan hidup terhadap tingkat kemiskinan.

5.2 Uji Asumsi Klasik

Model regresi yang baik adalah model regresi yang memenuhi asumsi dasar sehingga diperoleh model regresi yang BLUE (Best Linier Unbiased Estimate). Uji asumsi dasar yang dimaksud meliputi asumsi autokorelasi, multikolinearitas, heteroskedastisitas, dan normalitas. Model regresi yang memenuhi beberapa asumsi dasar tersebut akan mengakibatkan pengambilan kesimpulan bisa lebih tepat dan menggambarkan kondisi yang sebenarnya.

5.2.1 Uji Normalitas

Data yang terdistribusi normal adalah data yang memiliki nilai probabilitas J-B statistik yang lebih besar dari 0,05 (pada alpha 5%) (Sriwinarti, 2004). Dari hasil regresi didapatkan nilai probabilitas J-B (lampiran 2) statistik sebesar 0.052951 yang lebih besar dari 0,05 berarti menunjukkan bahwa data terdistribusi normal dan layak digunakan dalam penelitian.

5.2.2 Uji Autokorelasi

Secara harfiah, autokorelasi berarti adanya korelasi antara satu variabel pengganggu dengan variabel pengganggu lainnya (Widarjono,2005). Dari hasil regresi didapatkan nilai Durbin-Watson sebesar 1,819533, dari tabel Durbin-Watson ($n=95$, $k = 2$) (α) 5 % didapatkan nilai $d_L = 1,62$ dan $d_U = 1,70$ sehingga nilai $(4-d_U) = 2,38$ dan nilai $(4-d_L) = 2,30$. Jika dilihat dalam bagan uji Durbin-Watson diketahui bahwa nilai Durbin-Watson (1,81) terletak pada daerah tidak ada autokorelasi, sehingga bisa dinyatakan model regresi terbebas dari autokorelasi.

5.2.3 Uji Multikolinearitas

Salah satu metode yang digunakan untuk menguji asumsi ini yaitu dengan menggunakan *Corelaton Matrix* (r) masing-masing variabel baik independen maupun dependen. Hasil uji multikolinearitas dirangkum pada tabel berikut :

Tabel 5.1
Multikolinearitas
Corelaton Matrix (r)

Variabel	KMSKN	PDRBKAP	AHH
KMSKN	1.000000	-0.628040	-0.693964
PDRBKAP	-0.628040	1.000000	0.661110
AHH	-0.693964	0.661110	1.000000

Model dinyatakan terkena multikolinearitas jika r (absolute) $> 0,85$ (Widarjono,2005). Dari tabel tidak terdapat r (nilai absolute) yang besar dari 0,85% sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi multikolinearitas.

5.2.4 Uji Heteroskedastisitas

Untuk menguji ada tidaknya heteroskedastisitas (variabel pengganggu mempunyai varian yang tidak konstan) yaitu dengan menggunakan Uji *white heteroscedasticity no cross term* dimana jika chi-squared probability ($\text{Obs} \times R^2$) $> 0,05$ berarti tidak terjadi heteroskedastisitas.

Hasil uji heteroskedastisitas dirangkum pada tabel dibawah ini::

Tabel 5.2
Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.801628	Prob. F(5,89)	0.1206
Obs*R-squared	8.731654	Prob. Chi-Square(5)	0.1203
Scaled explained SS	17.69635	Prob. Chi-Square(5)	0.0034

Dari tabel diatas terlihat bahwa probability ($\text{Obs} \times R^2$) lebih besar ($0,1203$) $> 0,05$ sehingga bisa dinyatakan bahwa model terbebas dari asumsi tidak terjadi heteroskedastisitas.

BAB VI

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil studi yang telah dilakukan maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Berdasarkan hasil analisis diketahui bahwa variabel PDRB perkapita berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pada PDRB perkapita akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan PDRB perkapita yang semakin meningkat, maka pemerintah dapat lebih meningkatkan program-program penanggulangan kemiskinan yang sudah ada. Sehingga kesejahteraan dan pemerataan pendapatan masyarakat miskin dapat meningkat. Dengan meningkatnya kesejahteraan rakyat miskin, maka akan menekan angka kemiskinan.

2. Variabel angka harapan hidup berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat kemiskinan. Hal ini mengindikasikan bahwa kenaikan pada angka harapan hidup akan menurunkan tingkat kemiskinan. Dengan Angka Harapan Hidup yang terus meningkat maka kualitas kesehatan masyarakat, akan meningkat. Hal ini akan menekan angka kemiskinan, karena dengan kualitas kesehatan yang tinggi, maka akan meningkatkan produktivitas masyarakat.

5.2 Saran

1. Pemerintah perlu meningkatkan PDRB perkapita guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang nantinya akan mengurangi tingkat kemiskinan. Untuk itu perlu kiranya lebih meningkatkan produktifitas, peningkatan akumulasi modal

dan penekanan jumlah penduduk agar Produk Domestic Regional Bruto (PDRB) meningkat dan pendapatan perkapita naik serta jumlah penduduk miskin dapat berkurang. Untuk daerah Sumatera Barat salah satu upaya nyata yang dapat dilakukan adalah mendorong sektor Pariwisata dan Industri kecil guna penciptaan lapangan kerja yang akhirnya dapat meningkatkan PDRB perkapita.

2. Pemerintah perlu meningkatkan Angka Harapan Hidup melalui peningkatan akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan serta memberikan perlindungan jaminan kesehatan agar kualitas kesehatan penduduk terus meningkat, karena hal ini akan menunjang produktivitas masyarakat.

3. Adapun upaya lain yang harus dilakukan oleh Pemerintah daerah adalah tetap melanjutkan program pengentasan kemiskinan yang sudah ada seperti Raskin, PNPM mandiri, Bantuan Operasional Sekolah (BOS), JAMKESMAS, PAMSIMAS, KUR, Inpres Desa Tertinggal, dll, serta memastikan program ini tepat sasaran bagi penduduk miskin yang layak mendapatkannya. Adapun prioritas utama yang harus dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengentasan kemiskinan adalah meningkatkan akses pendidikan, kesehatan dan modal guna memutus rangkaian lingkaran setan kemiskinan.

4. Adanya kebijakan yang memungkinkan adanya akses dalam menyuarakan aspirasi dan pendapat dari kalangan miskin. Kebijakan ini diarahkan agar terciptanya dialog atau komunikasi dua arah antara pemerintah dan kelompok masyarakat miskin, diharapkan dengan cara ini terciptanya pemahaman yang lebih baik antara dua pihak, yang berlanjut pada penanganan masalah kemiskinan yang lebih efektif

DAFTAR PUSTAKA

- APBN 2008. "Nota Keuangan dan APBN 2008", www.google.com diakses 23 Agustus 2010.
- Arsyad, Lincoln. 1999. *Ekonomi Pembangunan, Edisi Keempat*. Yogyakarta : BP STIE YKPN
- Atmawikarta, Arum. 2004. "Investasi Kesehatan Untuk Pembangunan Ekonomi", www.google.com 11 Agustus 2010.
- Badan Pusat Statistik, 2005, *Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2006, *Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Data Produk Domestik Regional Bruto Kabupaten/Kota*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2006, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Sumatera Barat Dalam Angka*, Sumatera Barat.
- Badan Pusat Statistik, 2005 , *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2006, *Data dan Informasi Kemiskinan* , Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2007, *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2008, *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta
- Badan Pusat Statistik, 2009, *Data dan Informasi Kemiskinan*, Jakarta

Badan Pusat Statistik, 2010, *Proyeksi BPS*, Jakarta.

Bappenas. “Program Bantuan Langsung Tunai Kepada Rumah Tangga Sasaran”
<http://old.bappenas.go.id/modules.php?op=modload&name=News&file=article&sid=169>. www.bappenas.go.id, diakses 28 September 2010.

Dornbusch, R., S. Fisher, dan R. Startz. 2004. *Macroeconomics*, 9th ed. McGraw-hill. Boston.

Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.

Firdausi, Nur Tsaniyah, “Proyeksi Tingkat Kemiskinan Di Indonesia (Studi Kasus 30 Provinsi)”. www.google.com, diakses 9 Januari 2011.

Firmansyah, 2006, *Aplikasi Econometric Views (Eviews) V. 3.0-4.1*, Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Gujarati, Damodar. 1995. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Ketiga. Jakarta: Erlangga.

Gujarati, Damodar. 2003. *Ekonometrika Dasar* : Edisi Keenam. Jakarta: Erlangga.

Ghozali, I . 2002. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Ghozali, I . 2005. *Aplikasi Analisis Multivariate dengan program SPSS*. Semarang :Badan Penerbit Universitas Diponegoro.

Hatta, Liswarti. “Aplikasi dan Prospek Program Inpres Desa Tertinggal,
<http://www.digilib.ui.ac.id/opac/themes/libri2/detail.jsp?id=77264>, www.digilib.ui.ac.id, diakses 28 Januari 2011.

Hidayat, Saeful dan Patunru, Arianto A. 2007. “Pertumbuhan Ekonomi, Ketidakmerataan Pendapatan dan Kemiskinan: Estimasi Parameter.” “Elastisitas Kemiskinan Tingkat Provinsi Di Indonesia Tahun 1996-2005”. www.google.com, diakses 9 Januari 2011.

Jaminan kesehatan Masyarakat . 2010. “MDGs Tanggung Jawab Pemerintah Kepada Masyarakat.” www.depkes.go.id, diakses 28 September 2010.

Kapsos, Stephen. 2004. “Estimating growth requirements for reducing working poverty: Can the world halve working poverty by 2015” www.google.com ,diakses 8 Januari 2011.

Komisi Makroekonomi dan Kesehatan, 2001, *Laporan Komisi Makroekonomi dan Kesehatan*, Jakarta.

- Kuncoro, Mudrajad. 1997. *Ekonomi Pembangunan, Teori, Masalah, dan Kebijakan, Edisi Ketiga*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN.
- Kuncoro, Mudrajad. 2001. *Metode Kuantitatif, Teori dan Aplikasi untuk Bisnis dan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE Yogyakarta.
- Mankiw, N.Gregory. 2004. *Teori Makro Ekonomi*. Jakarta : Erlangga.
- Mulyono, Sri, 2000, *Peramalan Bisnis dan Ekonometrika*. Edisi Pertama. BPFE. Yogyakarta.
- Nachrowi, D.Nachrowi. 2006. *Pendekatan Populer dan praktis Ekonometrika Untuk Analisis Ekonomi dan Keuangan*. Jakarta : UI
- Nazir, M. 1998. *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- PNPM Mandiri. 2007. "Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, http://www.pnpmmandiri.org/index.php?option=com_content&task=view&id=57&Itemid=105. www.pnpm-mandiri, diakses 27 September 2010.
- RAPBN 2010. "BAB II Perkembangan Ekonomi dan Pokok-pokok Kebijakan Fiskal RAPBN 2010". www.google.com diakses 23 Februari 2011.
- Retnadi, Joko. 2008. "Kredit Usaha Rakyat (KUR), harapan , dan tantangan." *Economic Review*, No 212, Juni 2008.
- Sarwono, Jonathan.2008. *Statistik itu Mudah*. Bandung : Andi Yogyakarta
- Setiawan, Sigit dan Handoko, Rudi. 2005. "Pertumbuhan Ekonomi 2006 : Suatu Estimasi dan Arah Pencapaian Pertumbuhan yang Merata dan Berkualitas." *Kajian Ekonomi dan Keuangan*, Vol.9, No.4.
- Siregar, Hermanto dan Wahyuniarti, Dwi. "Dampak Pertumbuhan Ekonomi Terhadap penurunan Jumlah Penduduk Miskin." www.google.com, diakses 20 Februari 2011.
- Sofyardi. 2005. *Pengantar Ekonometrika* .Padang
- Sukirno, Sadono. 2000. *Makro Ekonomi Modern*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.
- Todaro, Michael. 2000. *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, edisi kesembilan terjemahan Munandar, Haris. Jakarta : Bumi Aksara.
- UN. *Millenium Development Goals*. <http://www.un.org/millenniumgoals/> Diakses pada tanggal 3 Januari 2011.

Wahyuni, Tri. 2010. *"Implementasi Program Beras Untuk Masyarakat Miskin (Raskin) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat di Kelurahan Kota Bangun, Kecamatan Medan Deli."* www.google.com, diakses 28 Januari 2011.

Widarjoyo, Agus, 2005. *Ekonometrika, Teori dan Aplikasi untuk Ekonomi dan Bisnis*, Edisi Kedua.

Wijayanto, Ravi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh PDRB, Pendidikan, Pengangguran Terhadap Kemiskinan Di Jawa Tengah Tahun 2005 – 2008*. www.google.com, diakses 20 Februari 2011.

World Bank. 2007. *"Measuring Poverty"*. www.worldbank.org, diakses 7 Desember 2010.

www.Sumbarprov.go.id, 2009. *PNPM 2008 di Sumbar Sukses 100 Persen*. diakses 9 Juli 2011.

www.koran-jakarta.com

Yakub, Yuzirwan. 2005. *Karakteristik rumah tangga miskin di Kota Padang Sebelum dan Sesudah Krisis Ekonomi Tahun 1998*. Tesis, Program Pasca Sarjana Universitas Andalas, Padang.

LAMPIRAN

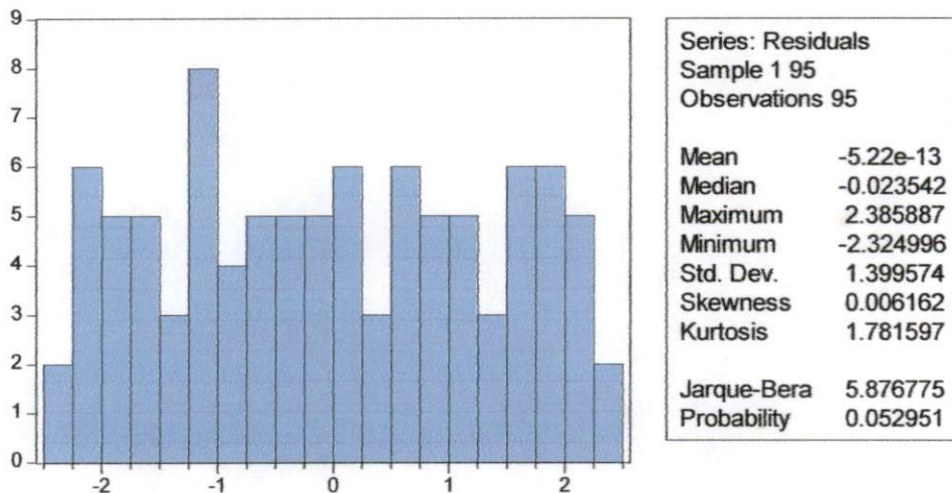
1. Hasil Regresi

Dependent Variable: KMSKN?
 Method: Pooled Least Squares
 Date: 05/31/11 Time: 15:43
 Sample: 2005 2009
 Included observations: 5
 Cross-sections included: 19
 Total pool (balanced) observations: 95

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	88.05428	12.82568	6.865468	0.0000
PDRBKAP?	-0.758981	0.239845	-3.164460	0.0021
AHH?	-1.062682	0.203896	-5.211879	0.0000
R-squared	0.532474	Mean dependent var		10.78368
Adjusted R-squared	0.522311	S.D. dependent var		4.800370
S.E. of regression	3.317779	Akaike info criterion		5.267538
Sum squared resid	1012.704	Schwarz criterion		5.348186
Log likelihood	-247.2080	Hannan-Quinn criter.		5.300126
F-statistic	52.39032	Durbin-Watson stat		1.819533
Prob(F-statistic)	0.000000			

2. Uji Asumsi Klasik

a. Deteksi Normalitas



b. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.801628	Prob. F(5,89)	0.1206
Obs*R-squared	8.731654	Prob. Chi-Square(5)	0.1203
Scaled explained SS	17.69635	Prob. Chi-Square(5)	0.0034

c. Uji Multikolinearitas

Corelaton Matrix (r)

Variabel	KMSKN	PDRBKAP	AHH
KMSKN	1.000000	-0.628040	-0.693964
PDRBKAP	-0.628040	1.000000	0.661110
AHH	-0.693964	0.661110	1.000000